

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DPRD Kota Semarang

Pada pemilu DPRD tahun 2019 di Kota Semarang sebanyak 50 (lima puluh) anggota calon legislatif terpilih dan dilantik secara resmi menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang pada Rabu, 14 Agustus 2019⁶⁵.

DPRD Kota Semarang jumlah anggotanya juga sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, terdiri dari wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019 berjumlah 50 orang, dengan susunan fraksi sebagai berikut:

1. PDIP : 19 anggota
2. Gerindra : 6 anggota
3. Demokrat : 6 anggota
4. PKS : 6 anggota
5. Golkar : 3 anggota
6. PAN : 2 anggota
7. PKB : 4 anggota
8. PSI : 2 anggota
9. Nasdem : 2 anggota

Alat kelengkapan DPRD Kota Semarang terdapat

⁶⁵ DPRD Kota Semarang, diakses <https://dprd.semarangkota.go.id/>, pada tanggal 13 September 2020

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna⁶⁶.

Secara geopolitik, wilayah DPRD Kota Semarang dipetakan ke dalam 6 Daerah Pemilihan (Dapil)

1. Daerah Pemilihan 1 : Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara;
2. Daerah Pemilihan 2 : Gayamsari, Genuk, Pedurungan;
3. Daerah Pemilihan 3 : Candisari Dan Tembalang;
4. Daerah Pemilihan 4 : Banyumanik, Gajahmungkur, Gunungpati;
5. Daerah Pemilihan 5 : Mijen, Ngaliyan, Tugu,
6. Daerah Pemilihan 6 : Semarang Selatan, Semarang Barat.

Berikut komposisi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024⁶⁷.

Tabel 4.1 Anggota DPRD kota Semarang berdasarkan Partai dan Dapil

No	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan
1	Trifena Weyatin Soehendro	PDIP	Dapil 1
2	Supriyadi	PDIP	Dapil 1
3	Novi Sukmawati Ayuningrum	PDIP	Dapil 1
4	Hanik Khoiru Solikah	PDIP	Dapil 2

⁶⁶ DPRD Kota Semarang, <https://dprd.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 22:18

⁶⁷ DPRD Kota Semarang, <https://dprd.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 22:18

5	Dyah Ratna Harimurti Alias detty	PDIP	Dapil 2
6	Adi Subkhan Ifana	PDIP	Dapil 2
7	Rahmulyo Adiwibowo	PDIP	Dapil 2
8	Meidiana Kuswara	PDIP	Dapil 2
9	Lely Purwandari	PDIP	Dapil 3
10	Dibyو Sutiman	PDIP	Dapil 3
11	Bambang Sri Wibowo	PDIP	Dapil 3
12	Giyanto	PDIP	Dapil 4
13	Nungki Sundari	PDIP	Dapil 4
14	Djoko Riyanto	PDIP	Dapil 4
15	Kadarlusman	PDIP	Dapil 5
16	Yuwanto	PDIP	Dapil 5
17	M. Rukiyanto A.B	PDIP	Dapil 6
18	Joko Susilo	PDIP	Dapil 6
19	Fajar Rinawan S	PDIP	Dapil 6
20	Joko Santoso	Gerindra	Dapil 1
21	Nunung Sriyanto	Gerindra	Dapil 2
22	Herlambang Prabowo S A	Gerindra	Dapil 3
23	Hermawan Sulis Sunarko	Gerindra	Dapil 4
24	Mualim	Gerindra	Dapil 5
25	Abdul Majid	Gerindra	Dapil 6
26	Swasti Aswagati	Demokrat	Dapil 1
27	Sugi Hartono	Demokrat	Dapil 2
28	Danur Rispriyanto	Demokrat	Dapil 3
29	Suciati	Demokrat	Dapil 4
30	Wiwin Subiyono	Demokrat	Dapil 5
31	Wahyoe Winarto (Liluk)	Demokrat	Dapil 6
32	Abdul Wahab	PKS	Dapil 1
33	Sifin Almufti	PKS	Dapil 2
34	Jauhar Awaludin	PKS	Dapil 3
35	Muhammad Afif, LC	PKS	Dapil 4
36	Suharsono	PKS	Dapil 5
37	H. Johan Rifai	PKS	Dapil 6
38	Budiharto	Nasdem	Dapil 1
39	Suryanto	Nasdem	Dapil 3
40	Sodri	PKB	Dapil 2
41	M. Rohaini	PKB	Dapil 3
42	Gumilang FW AliasFebri Soemarmo	PKB	Dapil 4
43	Juan Rama	PKB	Dapil 5
44	Wisnu Pudjonggo	Golkar	Dapil 2
45	H. Anang Budi Utomo	Golkar	Dapil 4
46	Erry Sadewo	Golkar	Dapil 6
47	Umi Surotud Diniyah	PAN	Dapil 4
48	Wachid Nurmiyanto	PAN	Dapil 5
49	Melly Pangestu	PSI	Dapil 1

50	Benediktus Narendra Keswara	PSI	Dapil 2
----	--------------------------------	-----	---------

Sumber : Hasil Observasi, diolah dan diakses melalui <https://dprd.semarangkota.go.id/> hingga akhir November 2021 pukul 22:18

50 Anggota DPRD Kota Semarang dimana dari banyaknya Anggota dari 9 Fraksi dan dibagi 6 wilayah daerah pilihan pasti mempunyai ciri khas atau cara tersendiri dalam berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, bagaimana cara mengawasi jalanya peraturan dan pembuat peraturan dan dalam menyampaikan kepada media massa seperti media massa internet juga mempunyai caranya masing-masing dalam berkomunikasi politik dalam menjalankan ketiga fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Kegiatan komunikasi politik dalam hal ini juga dilakukan melalui pemetaan wilayah komunikasi di Semarang sehingga semua komunikan; pemilih, konstituen, atau masyarakat bisa dijangkau secara lebih baik dalam kegiatan-kegiatan komunikasi yang rutin dilakukan anggota DPRD terutama dalam kegiatan reses. Perencanaan lain yang perlu dilakukan juga adalah proses pembentukan isu atau pesan komunikasi politik yang baik, yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Semarang.

4.2. Komunikasi Politik

Setiap Anggota DPRD Kota Semarang memiliki latar belakang yang berbeda dan mereka juga datang dari partai politik yang berbeda-beda pula. Dari perbedaan ini mendorong perlunya sebuah perencanaan komunikasi politik yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang ketiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Perencanaan dan pengelolaan ini pula yang akan menghindari kepentingan-kepentingan diluar tugas dan fungsi

DPRD yang sesungguhnya, dilakukan guna menamin berlangsungnya interaktivitas antara anggota DPRD dengan masyarakat kota Semarang sehingga isi pesan nya bermuatan politik yang berkaitan dengan ke tiga fungsi tersebut.

Komunikasi politik bisa terjadi karena adanya proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik, isi pesan nya pun bermuatan politik dari seseorang atau sekelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi targer politik (Hafied Cangara, 2016:30)⁶⁸. Dalam komunikasi politik sendiri, DPRD berangkat dari sistem yang baku yang telah menjadi kebiasaan diparlemen. Hal ini dilakukan agar anggota DPRD dalam melakukan komunikasi politik tidak sembarangan dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan melibatkan anggota masyarakat, agar harapan-harapan masyarakat bisa terpenuhi dan terlaksana. Proses komunikasi inilah yang dilakukan DPRD pada saat merumuskan Peraturan Daerah (Perda), merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan melakukan pengawasan.

Komunikasi politik bagi anggota dewan adalah komunikasi yang berhubungan langsung kepada masyarakat sehingga kegiatan kunjungan kerja dianggap sangat efektif. Anggota DPRD mengungkapkan bahwa melalui kunjungan kerja yang memiliki tingkat permasalahan yang ada di Kota Semarang mereka lebih bisa dalam melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan dan dikomunikasikan kepada masyarakat Kota Semarang. Komunikasi politik yang dilakukan DPRD Kota Semarang masih terbilang kaku karena terlihat dari input

⁶⁸ Prof. Hafied Cangara, M.Sc., Ph.D., *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*.(Depok:PT RajaGrafindo Persada,2016), hal 30.

yang dilakukan masih mengacu pada kegiatan-kegiatan rutin yang mereka lakukan sebagai anggota dewan. Penyampaiannya pun dari anggota dengan anggota lainnya sama hanya dengan *copy paste* informasi dari situs / media DPRD Kota Semarang. Selain kunjungan kerja, bimbingan teknis juga menjadi acuan DPRD dalam melakukan perencanaan komunikasi politik. Bimbingan teknis meliputi: optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, reses dan pokok pikiran DPRD.

Dalam komunikasi politik di era multimedia ini, media sosial dijadikan acuan dengan cara melakukan monitoring terhadap pemberitaan mengenai DPRD Kota Semarang yang berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kegiatan komunikasi politik DPRD juga dilakukan melalui pemetaan wilayah sehingga semua masyarakat bisa dijangkau secara lebih baik dalam kegiatan-kegiatan komunikasi yang rutin dilakukan anggota DPRD Kota Semarang. Perencanaan komunikasi politik yang perlu dilakukan adalah proses pembentukan isu atau pesan komunikasi politik yang baik yang menyangkut kepentingan masyarakat yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Semarang hingga pemilihan saluran media komunikasi politik yang mereka tentukan atau mereka pilih untuk mengkomunikasikan fungsi-fungsi DPRD.

4.3. Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Semarang

Internet hadir ditengah komunitas sosial masyarakat dunia memberikan pengaruh secara langsung dalam berbagai aktivitas politik. Tidak terhindarkan, proses komunikasi politik kini tidak bisa mengabaikan internet sebagai saluran paling efektif karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media sebelumnya. Penggunaan media *online* untuk berkampanye pun sudah dimulai melalui media sosial seperti facebook, twitter, youtube dan situs website⁶⁹.

NO	Fraksi		Instagram	Facebook	Twitter
	Nama	Anggota			
1	PDIP	19	10	9	4
2	GERINDRA	6	2	4	0
3	PKS	6	5	5	0
4	DEMOKRAT	6	3	5	0
5	PKB	4	2	4	0
6	PAN	2	2	1	0
7	GOLKAR	3	1	2	0
8	NASDEM	2	1	1	0
9	PSI	2	1	2	0
TOTAL			27	33	4

**Tabel 4.2 Observasi media sosial Anggota DPRD Kota Semarang
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)**

Sumber : Sumber : Hasil Observasi, diolah dan diakses melalui <https://dprd.semarangkota.go.id/> hingga akhir Agustus 2020

Anggota DPRD di kota Semarang dengan total 9 fraksi juga menggunakan media internet, banyak dari Anggota DPRD Kota Semarang menggunakan media internet yaitu juga media jejaring sosial seperti akun Instagram, Facebook dan Twitter. Dari 27 Anggota DPRD di kota Semarang yang menggunakan akun Instagram, 33 Anggota DPRD yang menggunakan akun Facebook dan 4 Anggota DPRD yang menggunakan akun Twitter, peneliti membagi lagi Anggota-Anggota DPRD di Kota Semarang menggunakan media internet untuk berkomunikasi politik

⁶⁹ Roni Tabroni, M.Si., *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal 151

yang berkaitan dengan kinerja dalam fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Tabel 4.3 Olah data postingan DPRD kota Semarang di akun Instagram, Facebook dan Twitter berkaitan fungsi DPRD (1 September 2019 hingga 28 Februari 2021)

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter			
			L	A	P	L	A	P	L	A	P	
1	PDIP	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom										
2		Supriyadi, S.Sos., MA										
3		Novi Sukmawati Ayuningrum, S.E										
4		Hanik Khoiru Solikhah, S.E										
5		Dyah Ratna Harimurti, S.Sos										
6		Adi Subkhan Ifana										
7		Rahmulyo Adiwibowo, S.H., M.H					2	2				
8		H. Meidiana Kuswara, A.Md										
19		Lely Purwandari										
10		H. Dibyo Sutiman, S.H										
11		Bambang Sri Wibowo, S.Sos										
12		Giyanto, S.E										
13		Nungki Sundari, S.E										
14		V. Djoko Riyanto, S.E										
15		Kadarlusman, S.E		2	3		2					
16		R. Yuwanto										
17		H.M. Rukhiyanto A.B, S.H										
18		Joko Susilo										
19		Fajar Rinawan S, S.H										

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter		
			L	A	P	L	A	P	L	A	P
1	Gerindra	H. Joko Ssantoso, S.E., M.M									

2		Nunung Sriyanto, S.H., M.M										
3		Herlambang Prabowo S A										
4		Hermawan Sulis S, S.E										
5		Mualim, S.Pd., M.M				1	1					
6		Drs. Abdul Majid										

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter			
			L	A	P	L	A	P	L	A	P	
1	PKS	Abdul Wahab, S.Ag, M.Pd.I										
2		M. Sifin Almufti, S.Ag				2	1	4				
3		Jauhar Awaludin			1	1	3	1				
4		H. Muhammad Afif, LC						1				
5		Suharsono, S.S., M.Si				2	2	3				
6		Ir. Johan Rifai										

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter			
			L	A	P	L	A	P	L	A	P	
1	Demokrat	Swasti Aswagati, S.Psi										
2		H. Sugi Hartono, S.Sos.I										
3		Danur Rispriyanto										
4		Suciati										
5		H. Wiwin Subiyono										
6		Wahyu Winarto (Liluk)										

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter			
			L	A	P	L	A	P	L	A	P	
1	PKB	H. Sodri, S.H										
2		H.M. Rohaini										
3		Gumilang F W alias Febri Soemarmo, S.T., M.M	4	2	3							
4		H. Juan Rama	5	4	2	5	4	2				

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter		
			L	A	P	L	A	P	L	A	P
1	PAN	Hj. Umi Surotud Diniyah, SE									
2		Ir. Wachid Nurmiyanto									

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter		
			L	A	P	L	A	P	L	A	P
1	Golkar	Dr. H. Anang Budi Utomo, M.Pd									
2		Erry Sadewo, S.H									
3		Wisnu Pudjonggo, SH									

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter		
			L	A	P	L	A	P	L	A	P
1	Nasdem	H. Budiharto, S.T., M.M									
2		Suryanto									

No	Fraksi	Nama	Instagram			Facebook			Twitter		
			L	A	P	L	A	P	L	A	P
1	PSI	Melly Pangestu	1		2	2	1	4			
2		Benediktus Narendra Keswara				1		1			

Sumber : Olah data postingan Instagram, Facebook dan Twitter Anggota DPRD Kota Semarang (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu postingan-postingan mengenai komunikasi politik 50 anggota DPRD Semarang dalam penggunaan internet melalui akun media sosial Instagram, Facebook dan Twitter Semarang sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021. Postingan yang berkaitan dengan komunikasi politik anggota DPRD Semarang yang dibagi atau dikelompokkan sesuai dengan ke 3 fungsinya pada tabel 4.3 L yang berarti fungsi Legislasi, A yang berarti fungsi Anggaran dan P yang berarti fungsi Pengawasan. Kemudian peneliti membagi lagi dengan mengelompokkan Anggota-Anggota DPRD di kota Semarang yang berkomunikasi

politik di era multimedia dalam penggunaan internet melalui media sosial Facebook, Instagram dan Twitter dengan total 11 Anggota DPRD dari 9 fraksi.

Tabel 4.4 Olah data postingan DPRD kota Semarang di akun Instagram, Facebook dan Twitter berkaitan fungsi DPRD (1 September 2019 hingga 28 Februari 2021)

No	Nama	Akun Medsos	Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan
1	Rahmulyo Adiwibowo, S.H., M.H (Pdip)	Facebook	2	2	0
		Instagram	0	0	0
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	4		
2	Kadarlusman, S.E (Pdip)	Facebook	0	2	0
		Instagram	0	2	3
		Twitter	0	0	0
		Jumlah	7		
3	Mualim, S.Pd., M.M (Gerindra)	Facebook	1	1	0
		Instagram	0	0	0
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	2		
4	M. Sifin Almufti, S.Ag (Pks)	Facebook	2	1	4
		Instagram	0	0	0
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	7		
5	Jauhar Awaludin (Pks)	Facebook	1	3	1
		Instagram	0	0	1
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	6		
6	H. Muhammad Afif, Lc (Pks)	Facebook	0	0	1
		Instagram	0	0	0
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	1		
7	Suharsono, S.S., M.Si (Pks)	Facebook	0	4	3
		Instagram	0	0	0
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	7		
8	Gumilang F W Alias Febri Soemarmo, S.T., M.M (Pkb)	Facebook	-	-	-
		Instagram	3	3	3
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	9		
9	H. Juan Rama (Pkb)	Facebook	2	3	6
		Instagram	2	3	6
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	22		
10	Melly Pangestu	Facebook	2	1	4
		Instagram	0	0	2

	(Psi)	Twitter	-	-	-
		Jumlah	9		
11	Benediktus Narenda Keswara (Psi)	Facebook	0	1	1
		Instagram	-	-	-
		Twitter	-	-	-
		Jumlah	2		

Sumber : Olah data postingan Instagram, Facebook dan Twitter Anggota DPRD Kota Semarang (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Pada fraksi PDIP terdapat 2 anggota DPRD kota Semarang berkomunikasi politik melalui internet jejaring sosial yaitu Rahmulyo dan Kadarlusman. Kadarlusman sendiri saat ini menjabat sebagai ketua DPRD kota Semarang periode 2019-2024. 2 anggota tersebut aktif memposting mengenai fungsi Anggaran, Kadarlusman memposting sejumlah 4 postingan melalui akun Instagram @piluss_, dan Rahmulyo memposting 4 postingan melalui akun Facebook @Rahmulyo Adi Wibowo atau dikenal sebagai R A W. Postingan Rahmulyo juga sangat khas dengan “RAW Cerita Hari Ini”. Kadarlusman memposting mengenai laporan kerja pertanggung jawaban mengenai APBD TA 2019 dan membahas anggaran untuk bantuan kesehatan kepada dinkes saat covid. Rahmulyo sendiri membahas rapat anggaran bersama Sekda Pemkot (Sekretaris Daerah Pemerintah kota Semarang) dan *diupdate* secara berkala.

Pada fraksi Gerindra hanya 1 anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD yaitu Mualim Advan. Memberikan informasi mengenai rapat pembahasan program penetapan Perda dan APBD TA Semarang 2020. Pada fraksi PKS terdapat 4 anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD yaitu M. Sifin Almufti, S.Ag, Jauhar Awaludin, H. Muhammad Afif, LC, Suharsono, S.S., M.Si. 4 anggota tersebut lebih banyak memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi Pengawasan pada pembangunan yang tak kunjung tuntas. Pada fraksi Demokrat, tidak ada satupun

anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD, keseluruhan hanya memposting mengenai informasi pribadi dan kegiatan diluar ke tiga fungsi DPRD.

Pada fraksi PKB terdapat 2 anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD dan 2 anggota tersebut cukup banyak memposting, 2 anggota tersebut adalah Gumilang F W dan Juan Rama. 2 anggota tersebut paling banyak memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi Legislasi. Memberikan informasi mengenai pembahasan Raperda TA 2019, TA 2020 dan TA 2021. Pada fraksi PAN, tidak ada satupun anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD, keseluruhan hanya memposting mengenai informasi pribadi dan kegiatan diluar ke tiga fungsi DPRD. Pada fraksi Golkar, tidak ada satupun anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD, keseluruhan hanya memposting mengenai informasi pribadi dan kegiatan diluar ke tiga fungsi DPRD.

Pada fraksi Nasdem, tidak ada satupun anggota DPRD yang memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD, keseluruhan hanya memposting mengenai informasi pribadi dan kegiatan diluar ke tiga fungsi DPRD. Pada fraksi PSI, 2 anggota tersebut dua dua nya terdapat postingan yang berkaitan dengan fungsi DPRD, dan paling banyak memposting yaitu ketua PSI sendiri yaitu Melly Pang. Melly Pang banyak memposting postingan yang berkaitan dengan fungsi Pengawasan. Melly sendiri lebih sering menyidak, meninjau dan mendapat informasi dari warga melalui pembangunan liar, PKL, dan PDAM.

**Tabel 4.5 Jumlah postingan 11 Anggota DPRD Kota Semarang
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)**

No	Nama Anggota DPRD	Urutan Jumlah Postingan
1	H. Juan Rama (PKB)	22
2	Melly Pangestu (PSI)	10
3	Gumilang F W alias Febri Soemarmo, S.T., M.M (PKB)	9
4	M. Sifin Almufti, S.Ag (PKS)	7
5	Kadarlusman, S.E (PDIP)	7
6	Suharsono, S.S., M.Si (PKS)	7
7	Jauhar Awaludin (PKS)	6
8	Rahmulyo Adiwibowo, S.H., M.H (PDIP)	4
9	Mualim, S.Pd., M.M (GERINDRA)	2
10	Benediktus Narendra Keswara (PSI)	2
11	H. Muhammad Afif, LC (PKS)	1

Sumber : Observasi 11 akun media sosial Anggota DPRD Kota Semarang (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Pada tabel 4.5 dari 11 Anggota DPRD di kota Semarang, Juan Rama paling banyak melakukan aktivitas politik di media sosial terkait kinerjanya mengenai 3 fungsi DPRD dengan jumlah 22 postingan dan paling sedikit Muhammad Afif dengan jumlah 1 postingan, peneliti mengambil 3 sampel dari tiap fraksi dengan jumlah postingan paling banyak dari 11 Anggota DPRD kota Semarang yaitu Juan Rama dari fraksi PKB, Melly Pangestu dari fraksi PSI dan Muhammad Sifin Almufti dari fraksi PKS mengenai bagaimana komunikasi politiknya melalui akun media sosial Facebook, Instagram dan Twitter sejak 1 September 2019 setelah pelantikan hingga 28 Februari 2021.

4.4. Komunikasi Politik Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Melalui Media Sosial

Van Dijk dalam Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat

sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Pada intinya, dengan media sosial dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Media sosial diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing, Collaborating dan Connecting*⁷⁰.

Media Instagram, Facebook dan Twitter juga sudah digunakan tokoh politik seperti DPRD dalam menjalankan aktivitasnya yang bermuatan politik dan peneliti telah melakukan observasi mengenai komunikasi politik Juan Rama, Melly Pangestu, Muhammad Sifin Almufti melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook dan Twitter yang berkaitan dengan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan dari 1 September 2019 hingga 28 Februari.

Media sosial merupakan salah satu tempat atau wadah pemerintah dapat menyalurkan informasi-informasi yang ada kepada masyarakat. Melalui media sosial semua kalangan masyarakat dapat mengetahuinya karena sifat media sosial yang terbuka untuk umum. Persebaran informasi melalui media sosial juga terbilang sangat cepat, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahuinya secara bersamaan. Terkait pengelolaan media sosial, manfaat media sosial, dan saluran media sosial bagi Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti dalam mengkomunikasikan kinerjanya yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan:

⁷⁰ Setiadi, 2016, "Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi"-*JURNAL CAKRAWALA-JURNAL HUMANIORA*, Vol. 16, No. 2, (Karawang: AMIK BSI) hal 2.

1. **Pengelolaan Media Sosial Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti**

Kehadiran media sosial menuntut para pelaku politik untuk beradaptasi. Dalam era politik kontemporer, politisi harus memikirkan audiens interaktif dan kapasitas mereka untuk menjawab, menanggapi, mendistribusikan dan memodifikasi pesan yang mereka terima. Di era interaktif digital, pelaku politik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka akan dimodifikasi oleh pihak lain ketika pesan tersebut disampaikan melalui media sosial. Maka dari itu untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat melalui media sosial secara terus menerus. Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti mengelola media sosial secara pribadi dan tidak ada pihak lain untuk memantau atau menggunakan media sosialnya untuk mengkomunikasikan kinerjanya melalui media sosial.

Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti sudah mengelola media sosial secara pribadi sejak tahun 2013, dengan mengelola media sosial secara pribadi, bisa dekat dengan masyarakat dan bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat karena apa yang mereka kerjakan dan lakukan nantinya kembali kepada masyarakat, mereka mampu memegang atau mengendalikan media sosialnya disela-sela kesibukan mereka. Hal tersebut dijelaskan oleh Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti “Sejauh ini karena saya masih mampu memegang sendiri, yang mengelola saya sendiri dan masyarakat menjadi tahu apa yang saya lakukan dan apa kebutuhan masyarakat saya bisa

informasikan secara cepat” (Lampiran 1, hal a). Menurut Muhammad Sifin Almufti “Terkait Pengelola, ada kepentingan dan keterbatasan dengan kebutuhan yang ada masih saya *handle* sendiri, karena bisa berinteraksi langsung, bisa posting sendiri, langsung ke audiensi” (Lampiran 2, hal c). Menurut Melly Pangestu “Saya sendiri.” (Lampiran 3, hal g).

Pengelolaan media sosial secara pribadi sangat penting karena media sosial adalah platform untuk berinteraksi baik berinteraksi dalam hal pekerjaan atau kegiatan pribadi, Anggota DPRD kota Semarang sangat senang jika apa yang mereka lakukan bisa memantau secara langsung tanpa perantara pihak ke tiga, kedekatan kepada masyarakat tidak hanya perihal kegiatan politik saja tetapi DPRD ingin masyarakat mengetahui bagaimana mereka bergerak saat menjalankan suatu kinerjanya dengan proses yang berkala dan Panjang.

2. **Manfaat Media Sosial**

Media sosial mempunyai kemampuan bagi para aktor politisi dalam menyampaikan kinerjanya, dengan menghemat waktu dan disituasi pandemi yang menuntut para aktor politik tidak bisa berhubungan langsung secara tatap muka dengan masyarakat, media sosial menjadi pilihan utama untuk menyampaikan pesan-pesan politik dalam memberikan informasi penuh seputar kebutuhan masyarakat dalam perihal pengawasan, jalanya anggaran, dan peraturan-peraturan pemerintah.

Masyarakat menjadi tahu apa yang dilakukan mengenai kinerjanya dan masyarakat menjadi tahu apa kebutuhan masyarakat, bisa

menginformasikan secara cepat dan bisa menginformasikan setiap detail program yang strategis dan meminimalisir terjadi kesalahan, meminimalisir harapan yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para Anggota DPRD, karena media sosial bisa dibaca secara terus menerus sehingga masyarakat bisa membaca dan mengetahui setiap detail yang diinformasikan ke media sosial. masyarakat jadi tau juga informasi yang Anggota DPRD ikuti oleh dinas terkait. Masyarakatpun dapat mengenal / menilai lebih dekat siapa wakil mereka di parlemen, dan apa saja yang dilakukan oleh wakil rakyat selama masa jabatan dan menjadi bukti kerja nyata untuk masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Sifin Almufti “Bisa menginformasikan setiap detail program yang strategis dan meminimalisir terjadi kesalahan, meminimalisir harapan yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang namanya media sosial itu kan paten bisa dibaca terus menerus sehingga masyarakat bisa membaca dan mengetahui setiap detail yang saya informasikan ke media sosial. Masyarakat jadi tau juga informasi yang saya ikuti oleh dinas terkait, jadi meluas juga untuk mensiarkan apa yang saya share” (Lampiran 2, hal e).

3. Saluran Media Sosial Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti

Saluran media massa adalah segala bentuk media massa yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bagi para aktor politik. Media massa lebih menarik, serta dapat menjangkau penerima manfaat yang sangat luas, termasuk daerah-daerah

terpencil yang susah dijangkau. Tentang hal ini, jika inovasi dapat dengan mudah dan jelas dapat tersampaikan lewat media massa, atau sebaliknya jika kelompok menerima manfaatnya dapat dengan mudah.

Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti juga menggunakan saluran media untuk berkomunikasi politik seperti whatsapp group yang langsung berinteraksi dan mengetahui apa keluhan dan keinginan masyarakat secara intens atau secara lebih dekat. Website resmi sesuai dengan fraksi nya seperti fraksi PKS, fraksi PSI resmi juga menjadi saluran media untuk para aktor politik DPRD Kota Semarang menginformasikan atau mengkomunikasikan kinerjanya sesuai dengan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Seperti dijelaskan oleh Muhammad Sifin Almufti “Kalau saya sendiri ada whatsapp group, saya punya lebih dari satu group, namanya KAB (Komunitas Anti Becik) yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta berwirausaha didalamnya, satu group sendiri ada 200-300 orang” (Lampiran 2, hal d) dan Juan Rama “Lewat whatsapp, lewat telfon, jadi langsung pribadi ke saya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan membutuhkan bantuan” (Lampiran 1, hal b).

Komunikasi Politik melalui media yang dilakukan Juan Rama, Muhammad Sifin Almufti dan Melly Pangestu terkait pengelolaan media sosial dari ke 3 Anggota sama-sama mengelola secara pribadi tanpa adanya bantuan orang lain karena bagi mereka bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Terkait pemanfaatan media sosial, sama-sama bisa menginformasikan kinerjanya mengenai

kegiatan dan program dan mengerti apa kebutuhan masyarakat melalui media sosial. Ke 3 Anggota DPRD tersebut sama-sama mempunyai saluran media lain selain Instagram, Facebook dan Twitter, yaitu whatsapps sebagai media saluran pribadi kepada masyarakat dalam menyerap informasi dan aspirasi, serta dari fraksi sendiri PKB belum ada saluran media resmi, dari fraksi PKS ada saluran media seperti PKS TV, Facebook PKS, untuk fraksi PSI terdapat website <https://psi.id>.

4.5. Instagram

Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan followers. Following yang artinya mengikuti pengguna, dan followers yang berarti pengguna lain yang mengikuti akun. Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon (feedback) dan (like) suka terhadap foto yang dibagikan⁷¹.

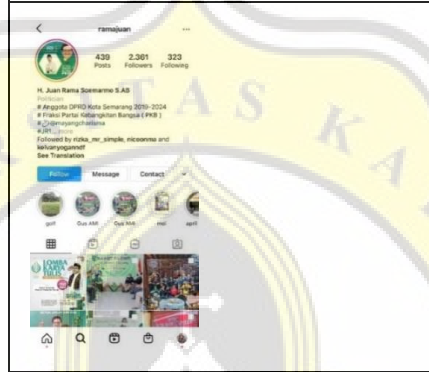
Media sosial merupakan salah satu tempat atau wadah pemerintah dapat menyalurkan informasi-informasi yang ada kepada masyarakat. Melalui media sosial semua kalangan masyarakat dapat mengetahuinya karena sifat media sosial yang terbuka untuk umum. Persebaran informasi melalui media sosial juga terbilang sangat cepat, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahuinya secara bersamaan.

Juan Rama menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Semarang dari fraksi

⁷¹ Sari, 2017, "Fenomena Pengguna Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau"-Jom FISIP, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, (Riau: Universitas Riau Bina Widya) hal 5-6.

PKB periode 2019 – 2024 dan sudah menggunakan akun Instagram sejak tahun 2013, tercatat sejak 1 September hingga 28 Februari Juan Rama ada akun Instagram nya @ramajuan mempunyai 2361 pengikut.

**Tabel 4.6 Observasi akun Instagram @ramajuan
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)**


Media sosial : @ramajuan (Instagram)

Pengikut : 2361
Jumlah Postingan mengenai fungsi DPRD : 11

Sumber : akun Instagram @ramajuan
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)


Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Juan Rama melalui media sosial Instagram @ramajuan miliknya merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik, seperti halnya Juan Rama yang menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD sebagai Anggota DPRD di kota Semarang melalui postingan-postingan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dari 206 postingan di Instagram @ramajuan terdapat 11 postingan membahas mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 6 postingan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, 3 postingan mengenai fungsi anggaran dan 2 postingsn


mengenai fungsi legislasi, komunikasi yang ada pada akun Instagram @ramajuan termasuk kedalam komunikasi satu arah, karena pada postingan-postingan tidak satupun terdapat respon tanggapan secara langsung dari Juan Rama di dalam kolom komentar tersebut.

**Tabel 4.7 Olah data postingan akun Instagram @ramajuan
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)**

No	Tanggal	Materi	Komentar	Klasifikasi Materi
1	2 Oktober 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Reposted from @dprdksemarangkota Rapat Pansus Produk Makanan Halal dan Higienis berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus</p>		Fungsi Legislasi

	<p>Sugi Hartono didampingi oleh anggota yang lainnya Juan Rama, Abdul Majid, Melly Pangestu, Dyah Ratna Harimurti. Hadir pula perwakilan dari Dispertan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Kemenag Kota Semarang, UPGRIS, UNIMUS, UNNES, Hypermart Paragon, IBC Kota Lama, Giant, Superindo, Transmart Carefour, catering di Kota Semarang, pedagang keliling, KBC, PPJI Semarang.</p> <p>Dalam tim naskah akademik memaparkan hasil raperda dan menghimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kualitas mutu produk, memberikan kepastian ketersediaan produk makanan halal higienis bagi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya produk halal dan higienis. Sugi Hartono menjelaskan bagaimana pro kontra di kalangan stakeholder dikarenakan ada beberapa peraturan yang ambigu dan berat di satu sisi “makanan halal” sehingga menurut stakeholder perihal makanan higienis lebih baik dihapus. Selain itu, perihal penanganan pasar hewan diperlukan penanganan khusus dengan menunjukkan bukti tertulis yang sah pada unit usaha produk hewan. Dari asosiasi pedagang mengharapkan adanya pelatihan sertifikasi bagaimana cara memasak yang sehat dan halal agar masyarakat dapat lebih</p>		
--	--	--	--

		mempercayai produk makanan yang dijual.		
2	29 September 2020	<p>Foto :</p>  <p>53 likes</p> <p>Captions : Reposted from @dprdsemarangkota Senin (28/9) Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Kota Semarang dengan Pembahasan Raperda APBD TA 2021 diselenggarakan bersama dengan Bapenda dan BPKAD di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Joko Susilo didampingi Wakil Ketua Komisi B Johan Rifai, dan Sekretaris Komisi B Herlambang Prabowo. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Nungki Sundari, Melly Pangestu, Juan Rama, Suryanto, Wiwin Subiyono dan Adi Subkhan Ifana serta OPD pendamping dari Inspektorat, Bagian Hukum, BPKAD, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.</p>		Fungsi Pengawasan
3	28 Juli 2020	Foto :		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions : “Mohon @disnakersmg untuk segera menindaklanjuti permasalahan masyarakat Kota Semarang, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi covid 19. Agar seimbang antara kewajiban yang sudah dilaksanakan dan hak yang seharusnya diperoleh. Mari kita berjuang bersama menciptakan Kota Semarang Semakin Hebat @hendrarpriyadi dan sejahtera masyarakatnya”.</p> <p>@dpp_pkb @cakiminow @dwpkbjateng @yusuf_ch @sukirman_kirana @dpcpkbkotasmg @muhmahsun @antoni_semarang</p> <p>http://beritajateng.net/ratusan-pekerja-jmi-unjuk-rasa-tuntut-gaji-dan-uang-lembur-dibayarkan/</p>		
4	28 Juli 2020	Video :		Fungsi Pengawasan



https://www.instagram.com/tv/CDLv9aNH1w8/?utm_medium=copy_link

Captions :
Dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Semarang dengan PT BPS

Reposted from @dprdsemarangkota Komisi B DPRD Kota Semarang menggelar Rapat dengar pendapat dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera, Selasa (28/7). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Joko Susilo didampingi Sekretaris Komisi B Johan Rifai. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B Nungki Sundari, Juan Rama, Wiwin Subiyono, Dibyo Sutiman, dan Suryanto. Hadir pula Dirut PT Bhumi Putra Sejahtera Hendro Prasetyo beserta jajarannya.


Hendro Prasetyo memaparkan perihal pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Jatibarang, setelah berjalan ternyata justru merugi. Karena dari semua sumur yang dimiliki hanya ada 5 sumur yang masih mengeluarkan gas metan, dan karena sifat gas metan yang tidak dapat dicadangkan maka ketika menghasilkan


		<p>gas metan langsung digunakan. Perjanjian PT BPS dengan PLN setelah adendum memunculkan angka kapasitas listrik yang telah ditentukan, namun kenyataannya jumlah kapasitas listrik yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga terkena denda. Sampai saat ini jumpah denda yang harus dibayarkan PT BPS sebesar 846 juta rupiah. Faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor alam dan kondisi sampah, apabila banyak sampah plastiknya maka gas yang dihasilkan pun sedikit, kadena sampah yang digunakan adalah sampah organik. Menanggapi hal tersebut, Wiwin mengatakan, apabila ingin dikembalikan ke pemerintah kota maka alasan yang diberikan harus jelas.</p> <p>Saat ini PT BPS telah merambah menjadi perusahaan daerah yang multi trading. Salah satunya adalah dengan menjual pulsa dan kuota. Di masa pandemik ini, PT BPS bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk menyediakan pulsa dan kuota untuk sistem pembelajaran daring. Dana BOS yang tadinya untuk buku paket dialihkan menjadi paket daring (handsanitizer, pulsa/kuota, tisu basah, dll) nantinya di distribusikan kepada murid-murid. Kemudian perihal ATK dan percetakan, Wiwin dan Nungky berharap Pemkot Semarang dapat lebih memaksimalkan BUMD melalui kerjasama dengan PT</p>		
--	--	---	--	--

		BPS. Selain itu dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kesiapan PT BPS pun secara teknis dan tenaga kerja sudah siap. Semua hewan dirawat dan dikontrol oleh dokter hewan, Kepala Rumah Potong Hewan pun Dokter Hewan.		
5	25 Maret 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Reposted from @dprdsemarangkota Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, menyikapi persoalan penularan virus corona yang makin massif di Kota Semarang, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang sepakat mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran kedinasan untuk dialokasikan ke penanganan kasus Covid-19. Beberapa anggaran yang dipangkas, di antaranya anggaran perjalanan dinas DPRD, anggaran reses, dan lainnya. Total hasil pemangkasan akan diserahkan ke Pemkot Semarang untuk dikelola sebagai anggaran penanganan virus corona di Kota Semarang. Anggaran tersebut diharapkan bisa digunakan Pemkot Semarang untuk menambah anggaran Rp 27 miliar yang sudah disiapkan guna penanganan</p>		Fungsi Anggaran

		<p>Covid-19. Terkait penggunaannya, DPRD Kota Semarang akan menyerahkan teknisnya ke Pemkot Semarang, termasuk ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pihaknya juga mendukung langkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait dengan kebijakan perubahan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Di mana dalam surat edaran Wali Kota Semarang, jam kerja ASN di lingkungan Pemkot Semarang hanya 3 jam, yakni pukul 07.00 hingga 10.00 dan selanjutnya dianjurkan untuk bekerja di rumah atau Work From Home. Namun demikian, Kadar Lusman mengingatkan, meski jam kerja di kantor lebih singkat yakni hanya 3 jam, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik</p>		
6	18 Maret 2020	<p>Foto :</p> 		Fungsi Pengawasan

		<p>Captions :</p> <p>Reposted from @dprdsemarangkota Rapat dengar pendapat membahas materi Raperda tentang produk makanan halal dan higienis berlangsung di Ruang Rapat Serba Guna 2 DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Produk Makanan Halal dan Higienis Sugi Hartono yang didampingi oleh Anggota Pansus Abdul Majid, Melly Pangestu, Hanik Khoiru Sholikha, Johan Rifai dan Juan Rama. Hadir pula dalam rapat ini yaitu Perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Jateng, Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Kota Semarang, MUI serta OPD (Organisasi Peragkat Daerah) terkait.</p> <p>Dalam paparannya Sugi Hartono menyampaikan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan produk makanan halal dan higienis diantaranya adalah menyusun kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan halal dan higienis, melakukan pendampingan atas produk makanan halal dan higienis di Kota Semarang serta memfasilitasi pensertifikatan produk makanan halal dan higienis di Kota Semarang yang salah</p>		
--	--	--	--	--

		<p>satunya melalui pembentukan lembaga pemeriksa halal. Dalam rapat kali ini juga dibahas tentang penyelenggaraan produk makanan halal dan higienis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya pangan halal dan higienis termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam untuk dikonsumsi. Lebih lanjut Sugi Hartono juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis meliputi pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong serta proses produksi dan barang hasil produksi. - #regrann</p>	
7	25 Februari 2020	<p>Foto</p> 	Fungsi Legislasi

		 <p>Captions : Reposted from @dprdsemarangkoita Rapat Pansus Raperda Produk Makanan Halal dan Higienis di Ruang Rapat Serbaguna 2 DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Sugi Hartono didampingi Anggota Pansus Dyah Ratna Harimurti, Abdul Majid, Juan Rama, Suryanto dan Rahmulyo AW. Hadir juga OPD Pemerintah Kota Smg, Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan DKP Kota Semarang serta Team Penyusun Naskah Akademik (NA). Paparan NA disampaikan oleh Team Penyusun NA, Bagian Hukum menanggapi agar raperda produk makan halal dan higienis bisa disandingkan dengan perda tentang keamanan pangan agar tidak terjadi tumpang tindih. Sugi Hartono menginginkan untuk rapat selanjutnya sudah dilakukan penyandingan dengan aturan-aturan yang baru agar tidak tumpang tindih. - #regrann</p>		
8	23 Januari 2020	Video :		Fungsi Pengawasan




https://www.instagram.com/p/B7pYyMuno0S/?utm_medium=copy_link

Captions :


Reposted from @dprdsemarangkota Rapat dengar pendapat Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Johan Rifai, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo. Diikuti Anggota Nungki Sundari, Melly Pangestu, Dibyo Sutiman, Juan Rama, Suryanto, Ali Subkhan, dan Wiwin Subiyono membahas RAPBD tahun 2020. Adapun OPD yang hadir diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan BPKAD Kota Semarang

Dinas Perdagangan pada tahun 2020 meningkatkan target PADnya menjadi 49,3 Miliar dari 44 Miliar di tahun 2019. Johan Rifai mengapresiasi adanya program rencana peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri milik Dinas Perdagangan di 2020, selain itu Wiwin Subiyono berharap Dinas Perdagangan dapat menangani musim hujan ini dengan baik sehingga pasar tidak becek dan bau.

		<p>Dari Dinas Koperasi, pada tahun 2020 akan melakukan banyak pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu di tahun 2020 semua pelaku usaha mikro mendapatkan legalitas usahanya dari Dinas Koperasi Kota Semarang. #dprdkotasemarang #esarapan #rapbd2020 #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #semarang #parlemenmodern #regrann#parlemenmodern #regrann</p>		
9	14 November 2019	<p>Video :</p>  <p>918 views · Liked by muftidakota</p> <p>https://www.instagram.com/p/B40SgJcnAIC/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions : Reposted from @dprdsemarangkota Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna membahas tentang Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kota Semarang TA 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim, Muhammad Afif, dan Wahyoe Winarto dan hadir Anggota Banggar Rahmulyo Adi Wibowo, Melly Pangestu, Juan Rama, Joko</p>		Fungsi Anggaran

		<p>Susilo, Danur Rispriyanto. Hadir pula Widoyono Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait</p> <p>Kepala BPKAD memaparkan mengenai Evaluasi Gubernur Raperda APBD 2020 dan Raperwal kota Semarang serta penjabarannya. Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara belum konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda tersebut diatas perlu dan intinya dewan menyetujui Raperda tersebut dan menunggu pengesahan di akhir tahun 2019. #dprdkotasemarang #esarapan #rapatbanggardprd #banggar #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #parlemenmodern - #regrann</p>		
10	13 November 2019	<p>Video :</p>  <p>549 views</p> <p>https://www.instagram.com/p/B4z7vXOHsZz/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions : Reposted from @dprdsemarangkota Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang</p>		Fungsi Anggaran

	<p>dipimpin oleh Ketua Banggar Kadar Lusman yang didampingi Wakil Ketua Banggar Muhammad Afif, Mualim, Wahyoe Winarto (Liluk) dan dihadiri segenap Anggota Banggar diantaranya HM. Rukiyanto, Trifena Weyatin, Hanik Khoiru Solikhah, Melly Pangestu, Rahmulyo Adi Wibowo, Juan Rama, Adi Subkhan Ifana, Budiharto, Anang Budi Utomo, Fajar Rinawan Sitorus, Joko Santoso, Suharsono, Joko Susilo, Wachid Nurmiyanto, Swasti Aswagati, Djoko Riyanto.</p> <p>Agenda Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang adalah Penyampaian Laporan Hasil Pendalaman Komisi-Komisi mengenai Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 dan Sinkronisasi Hasil Pendalaman Komisi-Komisi mengenai Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Dalam rapat hari ini sinkronisasi dan laporan hasil pembahasan dari masing-masing komisi dipaparkan kepada Ketua serta Anggota Banggar. Setelah pembahasan laporan dan beberapa masukan, badan anggaran menyetujui RAPBD Kota Semarang untuk selanjutnya dijadwalkan untuk diparipurnakan Rabu (13/11) Tahun Anggaran 2020.</p> <p>#dprdkotasemarang #esarapan #banggar #rapbd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang - #regrann</p>		
--	--	--	--

11	8 November 2019	<p>Video :</p>  <p>https://www.instagram.com/p/B4mB14hHduO/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions :</p> <p>Reposted from @dprdsemarangkota Rapat dengar pendapat Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Johan Rifai, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo. Diikuti Anggota Nungki Sundari, Melly Pangestu, Dibyo Sutiman, Juan Rama, Suryanto, Ali Subkhan, dan Wiwin Subiyono membahas RAPBD tahun 2020. Adapun OPD yang hadir diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan BPKAD Kota Semarang</p> <p>Dinas Perdagangan pada tahun 2020 meningkatkan target PADnya menjadi 49,3 Miliar dari 44 Miliar di tahun 2019. Johan Rifai mengapresiasi adanya program rencana peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri milik Dinas Perdagangan di 2020, selain</p>	Fungsi Pengawasan
----	-----------------------	---	----------------------

	<p>itu Wiwin Subiyono berharap Dinas Perdagangan dapat menangani musim hujan ini dengan baik sehingga pasar tidak becek dan bau.</p> <p>Dari Dinas Koperasi, pada tahun 2020 akan melakukan banyak pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu di tahun 2020 semua pelaku usaha mikro mendapatkan legalitas usahanya dari Dinas Koperasi Kota Semarang.</p> <p>#dprdkotasemarang #esarapan #rapbd2020 #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #semarang #parlemenmodern - #regrann#parlemenmodern - #regrann</p>		
--	--	--	--

Sumber : Olah data postingan Instagram @ramajuan (1 September 2019 – 28 September 2021)

Tabel 4.7 merupakan postingan berupa foto, video, *captions* mengenai komunikasi politik Juan Rama yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di Instagram @ramajuan, sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 terdapat total 11 postingan mengenai 3 fungsi DPRD, dari total 11 postingan terdapat total 5 postingan video, 11 foto, 6 postingan berkaitan dengan fungsi pengawasan, 3 postingan mengenai fungsi anggaran, 2 postingan mengenai fungsi legislasi.

Juan Rama dalam mengkomunikasikan kinerjanya melalui Instagram masih terlihat kaku karena Juan Rama lebih sering merepost akun resmi DPRD dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan kinerjanya melalui Instagram, dengan 11 postingan mengenai kinerjanya yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pada akun Instagram @ramajuan

selalu merepost melalui akun resmi @dprdsemarangkota. Tidak ada ciri khas khusus dalam mengkomunikasikan kinerjanya melalui Instagram, polanya selalu me-repost dari akun resmi @dprdsemarangkota, dari 11 postingan sejak 1 September hingga 28 Februari 2021 melalui Instagram.

Yang kedua, Melly Pangestu dari fraksi PSI menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 – 2024 dan sudah menggunakan akun Instagram sejak tahun 2013, tercatat sejak 1 September hingga 28 Februari Melly Pangestu pada akun Instagram nya @mellypangpsi mempunyai 668 pengikut.

Tabel 4.8 Data akun Instagram Melly Pangestu pada akun @mellypangpsi (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Media sosial : @mellypangpsi (Instagram)


Pengikut : 668
Jumlah Postingan : 2

Sumber : data akun Instagram @mellypangpsi sejak 1 September hingga 28 Februari 2021

Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Melly Pangestu melalui media sosial Instagram @mellypangpsi miliknya merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik, seperti halnya Melly

Pangestu yang menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD sebagai Anggota DPRD di kota Semarang melalui postingan-postingan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dari 76 postingan di Instagram @mellypangpsi terdapat total 2 postingan membahas mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 postingan berkaitan dengan fungsi pengawasan.

Tabel 4.9 Olah data postingan pada akun Instagram @mellypangpsi (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

No	Tanggal	Materi	Komentar	Klasifikasi Materi
1	27 Oktober 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : “Warga Semarang melapor kepada saya sebagai dewan. Beliau melapor tentang taman fasilitas umum pemukiman yang tiba-tiba sebagian didirikan</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>bangunan (sedang taraf pembangunan) untuk sebuah café. Hari Sabtu tanggal 24 kemarin saya cek TKP. Setelah bincang-bincang dengan pelapor dan tukang bangunan berikut dengan bukti design bangunan maka saya memutuskan untuk melakukan pendampingan bagi warga di daerah pemukiman tersebut. Hari ini pihak Kelurahan mengundang perwakilan Warga, RT, RW, Babinsa, Polsek, Dinas Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Perwakilan Pemilik Café. Karena saya harus berangkat Dinas, saya meminta Mahanantiyo selaku Direktorat bantuan hukum DPD PSI Kota Semarang untuk datang mewakili dan menjadi penengah. Dari pertemuan terkesan ngalor ngidul, antara dinas dan perwakilan pemilik yang ngotot bahwa pembangunan itu sudah sah. Halo sah darimana bila Warga keberatan dan tidak setuju? RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah unit penyeimbang ekosistem di lingkungan pemukiman, jangan ganti pohon dan oksigen kita dengan batu dan semen. Akan ada pertemuan kedua”.</p>		
2	24 Januari 2021	Foto:		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions :</p> <p>“Peninjauan dalam penggusuran PKL. Menjumpai Ketua dan Wakil Paguyuban PKL Semarang Utara (Pak Djasmu dan Pak Dikin). Ketua Paguyuban tidak pernah mendapat surat edaran dari pemerintah setempat / kelurahan. Pedagang bersedia pindah asal diberikan lahan baru untuk kelangsungan mata pencaharian mereka, tempat yang layak dan mudah dijangkau warga sekitar.</p> <p>Bersih memang indah, tetapi PKL juga bagian dari roda ekonomi kita”.</p>		
--	--	--	--	--

Sumber : analisa data akun Instagram @melly sejak 1 September hingga 28 Februari 2021

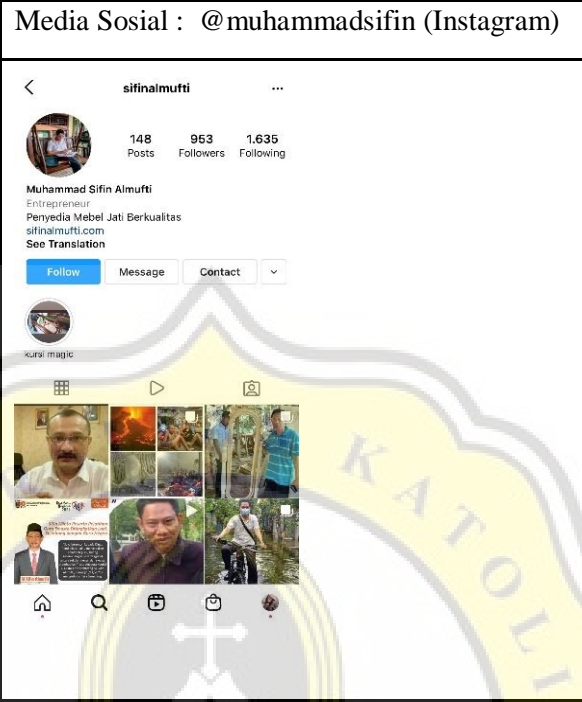
Pada tabel 4.9 merupakan postingan berupa foto, komentar dan *captions*

mengenai komunikasi politik Melly Pangestu yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di Instagram @mellypangpsi, sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 terdapat total 2 postingan mengenai fungsi pengawasan, dari 2 postingan terdapat 2 postingan foto dan 2 komentar.

Komunikasi yang dilakukan Melly Pangestu pada akun Instagram @mellypangpsi adalah komunikasi dua arah karena disaat masyarakat berkomentar mengenai aktivitas komunikasi politiknya, Melly Pangestu menanggapi komentar tersebut meskipun masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan Melly Pangestu membahas mengenai fungsi pengawasan dimana beliau memantau dan kunjungan lapangan langsung tentang permasalahan pembangunan liar dan penggusuran PKL. Melly Pangestu terjun dan langsung turun lapangan saat mendapat pelaporan dari masyarakat membuktikan bahwa Melly Pangestu sebagai Anggota DPRD cepat tanggap atas aduan masyarakat, dibuktikan pada saat wawancara bahwa sebagai Anggota DPRD Melly melakukan kinerjanya untuk masyarakat, dari kebijakan-kebijakan yang sudah disetujui untuk dilaksanakan bahwa fungsi pengawasanlah menjadi fungsi yang terpenting apakah semua sudah dijalankan atau harus diperbaiki demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Yang ketiga, Muhammad Sifin Almufti dari fraksi PKS menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 – 2024 dan sudah menggunakan akun Instagram sejak tahun 2013, tercatat sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 Muhammad Sifin Almufti pada akun Instagram nya @sifinalmufti mempunyai 953 pengikut.

Tabel 4.10 Akun Instagram Muhamamd Sifin Almufti pada akun @sifinalmufti (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Media Sosial : @muhammadsifin (Instagram)

Pengikut : 953
Jumlah Postingan berkaitan fungsi DPRD : 0

Sumber : analisa data akun Instagram @sifinalmufti sejak 1 September hingga 28 Februari 2021

Pada tabel 4.10 sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari, Muhammad Sifin tidak mengkomunikasikan aktivitas politiknya yang berkaitan dengan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Muhammad Sifin Almufti tidak memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media jejaring sosial untuk berkomunikasi politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan kinerjanya sebagai Anggota DPRD kota Semarang, Instagram menjadi sebuah akun dalam menginformasikan kegiatan pribadi nya saja, karena dari Analisa data sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 dengan total 80 postingan tidak ada satupun Muhammad Sifin Almufti mengkomunikasikan kinerjanya yang berkaitan dengan fungsi DPRD melalui akun Instagram nya

@sifinalmufti. Menandakan bahwa akun media sosial Instagram tidak diminati Muhammad Sifin Almufti dalam menginformasikan aktivitas politiknya.

Secara keseluruhan, instagram yang dikelola Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti dikelola untuk 3 hal antara lain : antara lain: (1) mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran); (2) berkomunikasi dengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masukan; (3) sarana hiburan yang diwujudkan dengan menggunakan media sosial sebagai penyaluran ekspresi diri dan informasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga. Namun Juan Rama, Melly Pangestu, dan Muhammad Sifin Almufti lebih banyak mengkomunikasikan ke media sosial perihal ekspresi diri dan kegiatan pribadi dibandingkan mengkomunikasikan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terbukti dari data yang diperoleh, dari 206 postingan yang ada di akun Instagram @ramajuan, Juan Rama hanya memposting 11 postingan berkaitan dengan fungsi dewan yaitu 6 postingan fungsi pengawasan, 3 postingan fungsi anggaran, 2 postingan fungsi legislasi. Pada akun Instagram @mellypangpsi dari 76 postingan, Melly Pangestu hanya memposting 2 postingan yang berkaitan dengan fungsi dewan yaitu fungsi pengawasan. Pada akun Instagram @muhammadsifin dari 80 postingan tidak ada satupun mengkomunikasikan fungsi dewan sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021. DPRD Kota Semarang perlu menyadari bahwa media sosial pada era multimedia mempunyai pengaruh banyak dan mempunyai banyak manfaat dalam bidang kinerja, terlebih pengguna instagram sangat tersegmen ke kalangan remaja atau anak muda, sehingga gambar

atau foto yang ditampilkan di akun instagram harus lebih menarik, variatif, namun tetap tidak meninggalkan fungsi inforamtif. Perlu meningkatkan upaya dalam pengelolaan media sosial agar membuahkan hasil dengan munculnya respon seperti komentar serta “like”. Sejauh ini, instagram tersebut belum mendapatkan respon berupa komentar-komentar.

4.6. Facebook

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. Menurut Van Belleghem facebook mempunyai pengguna aktif terbanyak dari media sosial yang lain, dimana 51% dari pengguna media sosial dunia memiliki akun facebook. Jumlah penggunaan facebook menurut data resmi mereka adalah lebih dari 800 juta diseluruh dunia⁷².

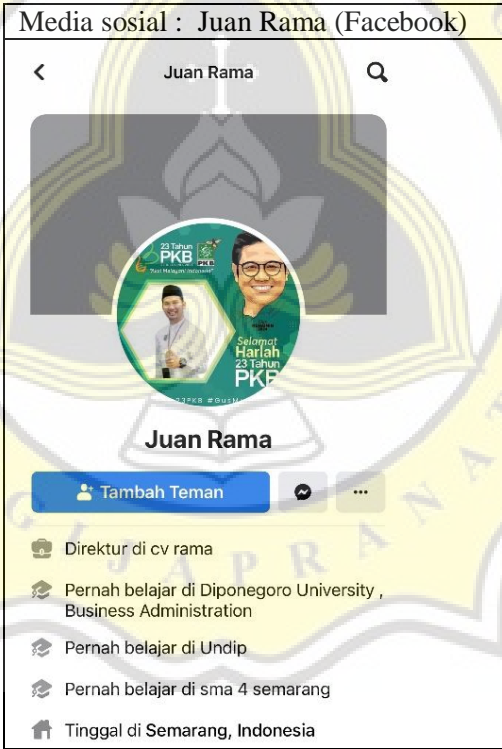
Menurut Budiyono, facebook bisa dimanfaatkan menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam proses kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi di era digital ini, khususnya pada konteks kampanye politik, media sosial telah berperan menjadi alat komunikasi yang bisa menghubungkan para pelaku politik dengan konstituennya, antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat masif. Masing-masing pelaku politik dan partisipannya bisa mengekspresikan kepentingannya atau hak-hak politiknya secara bebas tanpa

⁷² Mujahidah, 2013, “Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) sebagai Media Komunikasi”- *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol. XV No. 1, Juni 2013, (Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) hal 107

penghalang yang menghambat proses komunikasi politik. Pemanfaatan media sosial Facebook juga telah digunakan Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti sebagai Anggota DPRD di Kota Semarang untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya yang berkaitan dengan fungsi DPRD⁷³.

Pada akun Facebook Rama Juan sejak tanggal 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 terdapat postingan mengenai fungsi DPRD yang dilakukan oleh Juan Rama, sebagai berikut:

Tabel 4.11 analisa data akun facebook Juan Rama (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Media sosial : Juan Rama (Facebook)

Pengikut : 1830
Jumlah Postingan : 11

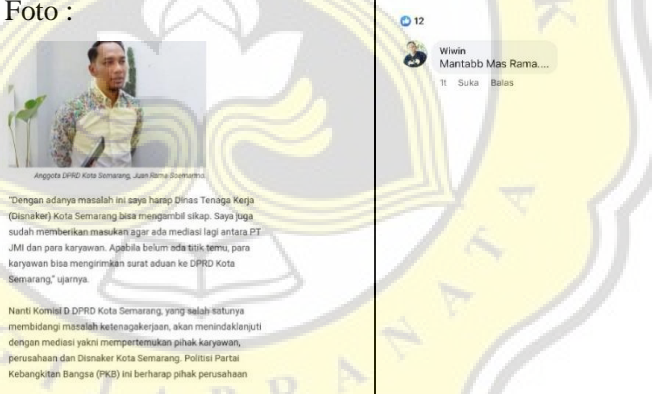
Sumber : Analisa data akun Facebook : Juan Rama (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

⁷³ Budiyo, 2016, “Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI JAKARTA 2017”-*Jurnal Komunikasi*, Vol. 11. No. 1, Oktober 2016, (Yogyakarta: BPPKI) hal 60-61.

Tabel 4.12 olah data akun facebook Juan Rama
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)



No	Tanggal	Materi	Komentar	Klasifikasi Materi
1	2 Oktober 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions :</p> <p>Rapat Public Hearing Pansus Produk Makanan Halal dan Higienis berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Sugi Hartono didampingi oleh anggota yang lainnya Juan Rama, Abdul Majid, Melly Pangestu, Dyah Ratna Harimurti. Hadir pula perwakilan dari Dispartan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Kemenag Kota Semarang, UPGRIS, UNIMUS, UNNES, Hypermart Paragon, IBC Kota Lama, Giant, Superindo, Transmart Carefour, catering di Kota Semarang, pedagang keliling, KBC, PPJI Semarang.</p> <p>Dalam public hearing tersebut tim naskah akademik memaparkan hasil raperda dan menghimbau agar para pelaku usaha meningkatkan</p>		Fungsi Legislasi


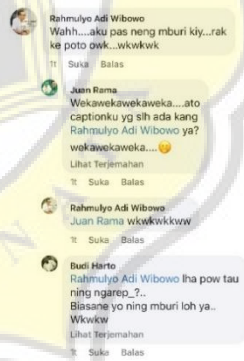
		<p>kualitas mutu produk, memberikan kepastian ketersediaan produk makanan halal higienis bagi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya produk halal dan higienis. Sugi Hartono menjelaskan bagaimana pro kontra di kalangan stakeholder dikarenakan ada beberapa peraturan yang ambigu dan berat di satu sisi “makanan halal” sehingga menurut stakeholder perihal makanan higienis lebih baik dihapus. Selain itu, perihal penanganan pasar hewan diperlukan penanganan khusus dengan menunjukkan bukti tertulis yang sah pada unit usaha produk hewan. Dari asosiasi pedagang mengharapkan adanya pelatihan sertifikasi bagaimana cara memasak yang sehat dan halal agar masyarakat dapat lebih mempercayai produk makanan yang dijual.</p>		
2	29 September 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Senin (28/9) Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>Kota Semarang dengan Pembahasan Raperda APBD TA 2021 diselenggarakan bersama dengan Bapenda dan BPKAD di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Semarang.</p> <p>Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Joko Susilo didampingi Wakil Ketua Komisi B Johan Rifai, dan Sekretaris Komisi B Herlambang Prabowo. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Nungki Sundari, Melly Pangestu, Juan Rama, Suryanto, Wiwin Subiyono dan Adi Subkhan Ifana serta OPD pendamping dari Inspektorat, Bagian Hukum, BPKAD, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.</p>		
3	28 Juli 2020	<p>Foto :</p>  <p>Anggota DPRD Kota Semarang, Juan Rama Berhenti.</p> <p>"Dengan adanya masalah ini saya harap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang bisa mengambil sikap. Saya juga sudah memberikan masukan agar ada mediasi lagi antara PT JMI dan para karyawan. Apabila belum ada titik temu, para karyawan bisa mengirimkan surat aduan ke DPRD Kota Semarang" ujarnya.</p> <p>Nanti Komisi D DPRD Kota Semarang, yang telah satunya membidangi masalah ketenagakerjaan, akan menindaklanjuti dengan mediasi yakni mempertemukan pihak karyawan, perusahaan dan Disnaker Kota Semarang. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap pihak perusahaan</p> <p>Captions : "Mohon @disnakersmg untuk segera menindaklanjuti permasalahan masyarakat Kota Semarang, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi covid 19. Agar seimbang antara kewajiban yang sudah dilaksanakan dan hak yang seharusnya diperoleh. Mari kita berjuang bersama menciptakan Kota Semarang Semakin Hebat @hendrarprihadi dan sejahtera masyarakatnya".</p>	<p>12</p> <p>Wiwin Martabb Mas Rama...</p> <p>11 Suka Belas</p>	Fungsi Pengawasan

		<p>@dpp_pkb @cakiminow @dppwpkbjateng @yusuf_ch @sukirman_kirana @dpcpkbkotasmg @muhmahsun @antoni_semarang</p> <p>http://beritajateng.net/ratusan-pekerja-jmi-unjuk-rasa-tuntut-gaji-dan-uang-lembur-dibayarkan/</p>		
4	28 Juli 2020	<p>Video :</p>  <p>https://www.instagram.com/tv/CDLv9aNH1w8/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions : Komisi B DPRD Kota Semarang menggelar Rapat dengar pendapat dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera, Selasa (28/7). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Joko Susilo didampingi Sekretaris Komisi B Johan Rifai. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B Nungki Sundari, Juan Rama, Wiwin Subiyono, Dibyo Sutiman, dan Suryanto. Hadir pula Dirut PT Bhumi Putra Sejahtera Hendro Prasetyo beserta jajarannya.</p> <p>Hendro Prasetyo memaparkan perihal pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Jatibarang, setelah berjalan ternyata justru merugi. Karena dari semua sumur yang dimiliki hanya ada 5 sumur yang masih</p>		Fungsi Pengawaswan

		<p>mengeluarkan gas metan, dan karena sifat gas metan yang tidak dapat dicadangkan maka ketika menghasilkan gas metan langsung digunakan. Perjanjian PT BPS dengan PLN setelah adendum memunculkan angka kapasitas listrik yang telah ditentukan, namun kenyataannya jumlah kapasitas listrik yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga terkena denda. Sampai saat ini jumpah denda yang harus dibayarkan PT BPS sebesar 846 juta rupiah. Faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor alam dan kondisi sampah, apabila banyak sampah plastiknya maka gas yang dihasilkan pun sedikit, kadena sampah yang digunakan adalah sampah organik. Menanggapi hal tersebut, Wiwin mengatakan, apabila ingin dikembalikan ke pemerintah kota maka alasan yang diberikan harus jelas.</p> <p>Saat ini PT BPS telah merambah menjadi perusahaan daerah yang multi trading. Salah satunya adalah dengan menjual pulsa dan kuota. Di masa pandemik ini, PT BPS bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk menyediakan pulsa dan kuota untuk sistem pembelajaran daring. Dana BOS yang tadinya untuk buku paket dialihkan menjadi paket daring (handsanitizer, pulsa/kuota, tisu basah, dll) nantinya di distribusikan kepada murid-murid. Kemudian perihal ATK dan percetakan, Wiwin dan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Nungky berharap Pemkot Semarang dapat lebih memaksimalkan BUMD melalui kerjasama dengan PT BPS. Selain itu dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kesiapan PT BPS pun secara teknis dan tenaga kerja sudah siap. Semua hewan dirawat dan dikontrol oleh dokter hewan, Kepala Rumah Potong Hewan pun Dokter Hewan.</p>		
5	25 Maret 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, menyikapi persoalan penularan virus corona yang makin massif di Kota Semarang, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang sepakat mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran kedinasan untuk dialokasikan ke penanganan kasus Covid-19. Beberapa anggaran yang dipangkas, di antaranya anggaran perjalanan dinas DPRD, anggaran reses, dan lainnya. Total hasil pemangkasan akan diserahkan ke Pemkot Semarang untuk dikelola sebagai anggaran penanganan virus corona di Kota Semarang. Anggaran tersebut diharapkan bisa digunakan Pemkot Semarang untuk menambah anggaran Rp 27 miliar yang sudah disiapkan guna penanganan Covid-19. Terkait penggunaannya, DPRD Kota</p>		Fungsi Anggaran

		<p>Semarang akan menyerahkan teknisnya ke Pemkot Semarang, termasuk ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pihaknya juga mendukung langkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait dengan kebijakan perubahan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Di mana dalam surat edaran Wali Kota Semarang, jam kerja ASN di lingkungan Pemkot Semarang hanya 3 jam, yakni pukul 07.00 hingga 10.00 dan selanjutnya dianjurkan untuk bekerja di rumah atau Work From Home. Namun demikian, Kadar Lusman mengingatkan, meski jam kerja di kantor lebih singkat yakni hanya 3 jam, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik</p>		
6	18 Maret 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Rapat dengar pendapat membahas materi Raperda tentang produk makanan halal dan higienis berlangsung di Ruang Rapat Serba Guna 2 DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Produk Makanan Halal dan Higienis Sugi Hartono yang didampingi oleh Anggota Pansus Abdul Majid, Melly Pangestu, Hanik Khoiru Sholikha, Johan Rifai dan</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>Juan Rama. Hadir pula dalam rapat ini yaitu Perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Jateng, Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Kota Semarang, MUI serta OPD (Organisasi Peragkat Daerah) terkait.</p> <p>Dalam paparannya Sugi Hartono menyampaikan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan produk makanan halal dan higienis diantaranya adalah menyusun kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan halal dan higienis, melakukan pendampingan atas produk makanan halal dan higienis di Kota Semarang serta memfasilitasi pensertifikatan produk makanan halal dan higienis di Kota Semarang yang salah satunya melalui pembentukan lembaga pemeriksa halal.</p> <p>Dalam rapat kali ini juga dibahas tentang penyelenggaraan produk makanan halal dan higienis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya pangan halal dan higienis termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam untuk dikonsumsi. Lebih lanjut Sugi Hartono juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan</p>		
--	--	--	--	--

		pengawasan produk halal dan higienis meliputi pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong serta proses produksi dan barang hasil produksi. - #regrann		
7	25 Februari 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Telah berlangsung Rapat Pansus Raperda Produk Makanan Halal dan Higienis di Ruang Rapat Serbaguna 2 DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Sugi Hartono didampingi Anggota Pansus Dyah Ratna Harimurti, Abdul Majid, Juan Rama, Suryanto dan Rahmulyo AW. Hadir juga OPD Pemerintah Kota Sng, Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan DKP Kota Semarang serta Team Penyusun Naskah Akademik (NA). Paparan NA disampaikan oleh Team Penyusun NA, Bagian Hukum menanggapi agar raperda produk makan halal dan higienis bisa disandingkan dengan perda tentang keamanan pangan agar tidak terjadi tumpang tindih. Sugi Hartono menginginkan untuk rapat selanjutnya sudah dilakukan penyandingan dengan aturan-aturan yang baru agar tidak tumpang tindih. - #regrann</p>		Fungsi Legislasi
8	23 Januari 2020	Video :		Fungsi Pengawasan




https://www.instagram.com/p/B7pYyMuno0S/?utm_medium=copy_link

Captions :

Rapat dengar pendapat Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Johan Rifai, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo. Diikuti Anggota Nungki Sundari, Melly Pangestu, Dibyo Sutiman, Juan Rama, Suryanto, Ali Subkhan, dan Wiwin Subiyono membahas RAPBD tahun 2020. Adapun OPD yang hadir diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan BPKAD Kota Semarang

Dinas Perdagangan pada tahun 2020 meningkatkan target PADnya menjadi 49,3 Miliar dari 44 Miliar di tahun 2019. Johan Rifai mengapresiasi adanya program rencana peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri milik Dinas Perdagangan di 2020, selain itu Wiwin Subiyono berharap Dinas Perdagangan dapat menangani musim hujan ini dengan baik sehingga pasar tidak becek dan bau. Dari Dinas Koperasi, pada tahun 2020 akan melakukan banyak pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu

		<p>di tahun 2020 semua pelaku usaha mikro mendapatkan legalitas usahanya dari Dinas Koperasi Kota Semarang. #dprdkotasemarang #esarapan #rapbd2020 #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #semarang #parlemenmodern - #regrann#parlemenmodern - #regrann</p>		
9	14 November 2019	<p>Video :</p>  <p>https://www.instagram.com/p/B40SgJcnAIC/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions : Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna membahas tentang Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kota Semarang TA 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim, Muhammad Afif, dan Wahyoe Winarto dan hadir Anggota Banggar Rahmulyo Adi Wibowo, Melly Pangestu, Juan Rama, Joko Susilo, Danur Rispryanto. Hadir pula Widoyono Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait</p>		Fungsi Anggaran

		<p>Kepala BPKAD memaparkan mengenai Evaluasi Gubernur Raperda APBD 2020 dan Raperwal kota Semarang serta penjabarannya. Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara belum konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda tersebut diatas perlu dan intinya dewan menyetujui Raperda tersebut dan menunggu pengesahan di akhir tahun 2019.</p> <p>#dprdkotasemarang #esarapan #rapatbanggardprd #banggar #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #parlemenmodern - #regrann</p>	
10	13 November 2019	<p>Video :</p>  <p>https://www.instagram.com/p/B4z7vXOHsZz/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions :</p> <p>Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang dipimpin oleh Ketua Banggar Kadar Lusman yang didampingi Wakil Ketua Banggar Muhammad Afif, Mualim, Wahyoe Winarto (Liluk) dan dihadiri segenap Anggota Banggar diantaranya HM. Rukiyanto, Trifena Weyatin, Hanik Khoiru Solikhah, Melly Pangestu, Rahmulyo Adi Wibowo, Juan Rama, Adi Subkhan Ifana, Budiharto,</p>	Fungsi Anggaran

		<p>Anang Budi Utomo, Fajar Rinawan Sitorus, Joko Santoso, Suharsono, Joko Susilo, Wachid Nurmiyanto, Swasti Aswagati, Djoko Riyanto. Agenda Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang adalah Penyampaian Laporan Hasil Pendalaman Komisi-Komisi mengenai Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 dan Sinkronisasi Hasil Pendalaman Komisi-Komisi mengenai Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Dalam rapat hari ini sinkronisasi dan laporan hasil pembahasan dari masing-masing komisi dipaparkan kepada Ketua serta Anggota Banggar. Setelah pembahasan laporan dan beberapa masukan, badan anggaran menyetujui RAPBD Kota Semarang untuk selanjutnya dijadwalkan untuk diparipurnakan Rabu (13/11) Tahun Anggaran 2020.</p> <p>#dprdkotasemarang #esarapan #banggar #rapbd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang - #regrann</p>		
11	8 November 2019	<p>Video :</p>  <p>https://www.instagram.com/p/B4mB14hHduO/?utm_medium=copy_link</p> <p>Captions : Rapat dengar pendapat Komisi B yang dipimpin</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Johan Rifai, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo. Diikuti Anggota Nungki Sundari, Melly Pangestu, Dibyo Sutiman, Juan Rama, Suryanto, Ali Subkhan, dan Wiwin Subiyono membahas RAPBD tahun 2020. Adapun OPD yang hadir diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan BPKAD Kota Semarang</p> <p>Dinas Perdagangan pada tahun 2020 meningkatkan target PADnya menjadi 49,3 Miliar dari 44 Miliar di tahun 2019. Johan Rifai mengapresiasi adanya program rencana peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri milik Dinas Perdagangan di 2020, selain itu Wiwin Subiyono berharap Dinas Perdagangan dapat menangani musim hujan ini dengan baik sehingga pasar tidak becek dan bau.</p> <p>Dari Dinas Koperasi, pada tahun 2020 akan melakukan banyak pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu di tahun 2020 semua pelaku usaha mikro mendapatkan legalitas usahanya dari Dinas Koperasi Kota Semarang.</p> <p>#dprdkotasemarang #esarapan #rapbd2020 #dprd #kotasemarang #semaranghebat #semarangsekarang #semarang #parlemenmodern - #regrann#parlemenmodern - #regrann</p>		
--	--	--	--	--

Sumber : Olah data postingan akun facebook Juan Rama sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021

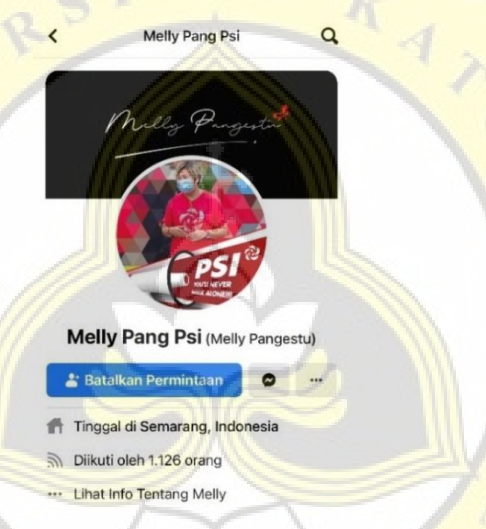
Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Juan Rama melalui media sosial Facebook Juan Rama merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik, seperti halnya Juan Rama yang menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD sebagai Anggota DPRD di kota Semarang melalui postingan-postingan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dari 398 postingan di Facebook Juan Rama terdapat 11 postingan membahas mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 6 postingan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, 3 postingan mengenai fungsi anggaran dan 2 postingan mengenai fungsi legislasi, komunikasi yang ada pada akun Facebook Juan Rama termasuk kedalam komunikasi dua arah, karena pada postingan-postingan terdapat respon tanggapan secara langsung dari Juan Rama di dalam kolom komentar tersebut.

Komunikasi politik yang dilakukan Juan Rama di akun Facebook nya dari *captions* sama hal nya dengan komunikasi politik yang dilakukan Juan Rama di akun Instagram nya, Juan Rama hanya melakukan pengulangan dengan merepost dan apa yang beliau komunikasikan, beliau meng*copy paste* ke akun Facebook nya, gaya komunikasi nya terlihat kaku dan tidak ada ciri khas khusus dalam mengkomunikasikan aktivitas politiknya melalui media sosial, tidak ada gaya komunikasi yang menandakan Juan Rama mempunyai ke ciri khas-an, lebih mengedepankan kepraktisan dengan meng*copy-paste* dari media sosial satu ke media sosial lainnya. Juan Rama lebih banyak mengkomunikasikan fungsi pengawasan juga tidak ada alasan khusus, bagi Juan Rama apa yang bisa

diinformasikan, Juan Rama langsung menginformasikan tanpa harus berfikir Juan Rama harus menginformasikan apa melalui media sosial nya.


Yang kedua, Melly Pangestu dari sudah menggunakan akun Facebook sejak tahun 2013, berikut adalah komunikasi politik Melly Pangestu melalui akun Facebook:




Tabel 4.13 analisa data akun Facebook Melly Pangestu (1 September 2019 – 28 Februari 2021)




Media sosial : Melly Pang PSI (Facebook)

Pengikut : 1423
Jumlah Postingan : 8

Sumber : analisa data akun Facebook Melly Pang PSI sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Tabel 4.14 Olah data postingan akun Facebook Melly Pang PSI (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

No	Tanggal	Materi	Komentar	Klasifikasi Materi
1	25 Februari 2021	Foto : 		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions : “Karena banyaknya laporan di sosmed & WA, maka siang td sy bergerak untuk lihat kondisi tanggul, pompa, dan saluran jalur air di Panggung Lor. Bergerak bersama warga, untuk kepentingan bersama, Terima kasih untuk DPU Kota Semarang yang sigap, Terima kasih untuk anggota Brimob yg sdh membantu talud semalam bersama warga, Bila semua mau bersatu, maka semua bisa dicari solusi bagi warga.. Makasih Bapak & Ibu RT-RW yang ikut mendampingi ke lokasi, Makasih Pak Lurah & Pak Camat, Makasih jg untuk Pak Setda Juga Korlap dr DPU, Bu Leni, Sinergi yg indah”.</p>		
2	8 Desember 2020	Foto : 		Fungsi Legislasi

		 <p>Captions : Senin (07/12) Pansus makanan Halal mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Sugi Hartono yang dihadiri oleh Anggota Pansus Dibyo Sutiman, Abdul Wahab, Juan Rama, Rahmulyo Adi Wibowo, Dyah Ratna Harimurti, Melly Pangestu dan Johan Rifai. Hadir pula OPD terkait Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satgas Halal dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Dalam rapat hari ini pansus mengagendakan pandangan akhir fraksi dan perumusan terhadap Raperda.</p>		
3	27 Oktober 2020	Foto : 		Fungsi Pengawasan





Captions :
“Warga Semarang melapor kepada saya sebagai dewan. Beliau melapor tentang taman fasilitas umum pemukiman yang tiba-tiba sebagian didirikan bangunan (sedang taraf pembangunan) untuk sebuah café. Hari Sabtu tanggal 24 kemarin saya cek TKP. Setelah bincang-bincang dengan pelapor dan tukang bangunan berikut dengan bukti design bangunan maka saya memutuskan untuk melakukan pendampingan bagi warga di daerah pemukiman tersebut. Hari ini pihak Kelurahan mengundang perwakilan Warga, RT, RW, Babinsa, Polsek, Dinas Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Perwakilan Pemilik Café. Karena saya harus berangkat Dinas, saya meminta Mahanantiyo selaku Direktorat bantuan hukum DPD PSI Kota Semarang untuk dating mewakili dan menjadi penengah. Dari pertemuan terkesan ngalor ngidul, antara dinas dan perwakilan pemilik yang ngotot bahwa pembangunan itu sudah sah. Halo sah darimana bila Warga keberatan dan



		tidak setuju? RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah unit penyeimbang ekosistem di lingkungan pemukiman, jangan ganti pohon dan oksigen kita dengan batu dan semen. Akan ada pertemuan kedua”.		
4	29 September 2020	<p>Captions :</p> <p>Rapat Public Hearing Pansus Produk Makanan Halal dan Higienis berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Sugi Hartono didampingi oleh anggota yang lainnya Juan Rama, Abdul Majid, Melly Pangestu, Dyah Ratna Harimurti. Hadir pula perwakilan dari Dispersan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Kemenag Kota Semarang, UPGRIS, UNIMUS, UNNES, Hypermart Paragon, IBC Kota Lama, Giant, Superindo, Transmart Carefour, catering di Kota Semarang, pedagang keliling, KBC, PPJI Semarang.</p> <p>Dalam public hearing tersebut tim naskah akademik memaparkan hasil raperda dan menghimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kualitas mutu produk, memberikan kepastian ketersediaan produk makanan halal higienis bagi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya produk halal dan higienis. Sugi Hartono menjelaskan bagaimana</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>pro kontra di kalangan stakeholder dikarenakan ada beberapa peraturan yang ambigu dan berat di satu sisi “makanan halal” sehingga menurut stakeholder perihal makanan higienis lebih baik dihapus. Selain itu, perihal penanganan pasar hewan diperlukan penanganan khusus dengan menunjukkan bukti tertulis yang sah pada unit usaha produk hewan. Dari asosiasi pedagang mengharapkan adanya pelatihan sertifikasi bagaimana cara memasak yang sehat dan halal agar masyarakat dapat lebih mempercayai produk makanan yang dijual</p>	
5	17 Februari 2020	<p>Captions :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komisi B dengan tajuk audiensi PKL Kali Es ttg pengurusan lahan PKL. Bahkan ada laporan dari pedagang, ada oknum yg menyuruh supaya mereka tdk melawan dan segera pindah dengan nada keras. 2. Cek Lokasi bersama Komisi B ke lokasi PKL Kali Es.. Dan segera akan kami tindak lanjut dengan mengundang pihak pelaksana proyek BBWS.. 3. Bertemu dgn ketua paguyuban PKL Smg Utara dan bbrp PKL Hasanuddin, terkait pengurusan yg blm bs dilaksanakan krn blm ada surat resmi dan sosialisasi ke seluruh pedagang PKL disana. Disambut baik oleh tmn2 PKL.. 	Fungsi Pengawasan

		Tdk ada surat resmi agar tgl 10 Maret 2021 lokasi harus dibersihkan. Tetapi baru sebatas himbauan dan sosialisasi, agar pedagang bs mempersiapkan diri untuk pindah atau relokasi. Sementara mmrt Pak Camat laha sdh ada tp blm diperbaiki untuk relokasi PKL2 di area Hasanuddin		
6	11 Februari 2020	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Sidak PDAM Kaligarong. Air tampungan di hilir, banyak endapan sampah dan lumpur, Padamnya PLN, jg membuat produksi terhenti.. Sdg dlm thp pengujian dan pengajian dgn PLN, sedimen lumpur yg cukup mengganggu, menyebabkan terkadang output air krg jernih Kami terus berupaya yg terbaik bagi warga kota Semarang</p>		Fungsi Pengawasan

7	8 November 2019	<p>Captions :</p> <p>Rapat kedua RAPBD Komisi B dgn mitra OPD : Dinas Perdagangan</p> <p>Memberikan pemaparan ttg fisik pasar Jatingaleh yg digunakan unt pasar pagi dr Bandungan. Dan M-Post..mesin tagih iuran untuk seluruh pedagang pasar maupun toko secara electronic, jd wajib bagi semua pedagang toko & pasar unt memiliki kartu M-Post tsb, menghindari kebocoran dan pungli.</p> <p>Badan Pendapatan Daerah Mengalami kenaikan signifikan, karena kesadaran masyarakat unt membayar pajak & PBB tepat waktu. Unt thn 2020 mengurangi bbrp anggaran yg mnrt dinas tersebut bisa digunakan oleh dinas lain yg membutuhkan, supaya defisit tdk terlalu besar.</p> <p>Dinas bagian perkonomian.</p> <p>a. PT. Taman Satwa Sedang berproses unt menaikkan minat masyarakat Smg dsk, spy bs meningkatkan pendapatan jg. Mendapat bbrp saran dr dewan unt pemeliharaan hewan2 & prasarana/fasilitas bagi pengunjung spy lbh diperhatikan & ditingkatkan.</p> <p>b. PD. BPR BKK & PD. BPR Bank Pasar Mengalami kemajuan dengan msg2 program yg dijalankan, sehingga post anggaran tdk terlalu berat. Keduanya dinilai sehat oleh OJK dan badan perbankan.</p>		Fungsi Anggaran
---	-----------------------	--	--	-----------------

		<p>c. PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera Secara rencana anggaran tdk ada yg signifikan. Harapan kami spy lbh maksimal pelayanan dan dapat menggunakan anggaran secara efektif & efisien.</p> <p>d. PDAM Mengalami lonjakan anggaran cukup besar. Anggaran tsb digunakan unt SPAM Pundak Payung dan pipa JDB SPAM Semarang Barat. Sy jg memberikan saran supaya biaya dipakai sebaik mungkin, dan tolong digaris bawahi..setiap pembangunan pipa.. PDAM hrs bertanggung jwb penuh mengembalikan seperti jalan semula, tanpa meninggalkan lubang atau gundukan yg dapat membuat warga tdk nyaman dan membahayakan pengguna jalan..segera dilakukan dan semoga setelah ini lbh berhati2 unt pembangunan.</p> <p>4. Dinas Koperasi & UMKM Setelah skorsing 1 hari, akhirnya dpt memberikan laporan pemaparan yg baik. Unt pelaku UMKM skrg sdh dipermudah oleh ijin2 yg dpt dilakukan secara online. Disini sy menyarankan agar stlh pelatihan2 dilakukan, tolong diselesaikan pembinaan scr mental spy bs menghadapi tantangan hingga proses kemampuan unt menjual di masyarakat bahkan ekspor bila ada/dimungkinkan. Di</p>		
--	--	---	--	--

		<p>koperasi jg sdh disediakan dana unt menunjang UMKM agar dapat berproses menjadi usaha mandiri.</p> <p>Demikian laporan saya. Salam solidaritas..</p>		
8	6 November 2019	<p>Captions : Pembahasan RAPBD 2020 Komisi B dengan OPD mitra hari pertama sbb : Dinas Perdagangan : Msh kurang materi perbandingan hasil unt tolak ukur keberhasilan pendapatan melalui e payment, gambaran pasar di jatingaleh yg merupakan relokasi dr pasar pagi di pasar peterongan. Dan ttg M post..sistem penggunaan dan bentuk fisiknya. Ternyata berkat m post serapan pendapatan pasar bs masuk 100%. Semoga stlh ini tdk ada lg kebocoran retribusi pasar. Sistem dan gambaran m post akan ditambahkan kembali di awal rapat besok pagi. Dinas Koperasi & UMKM, skorsing : Karena data anggaran msh banyak kekurangan penyusunan. Dinas BPKAT, berjalan baik. Tapi msh hrs direfisi unt dana hibah yg non pemerintahan spy tdk diberikan berturut2 ke satu ormas tapi bs berasas persamaan dan keadilan dgn ormas lain. Juga selisih jumlah didlm anggaran belanja sebesar 3M yg disanggah td tdk ada selisih pdhl dr penjumlahan ornamen</p>		Fungsi Anggaran

		selisih 3M.. Td sy paksa hitung ulang dan bsk sy tunggu jawabannya. Siap jaga uang rakyat.. Salam solidaritas		
--	--	---	--	--

Sumber : Olah data postingan akun Facebook Melly Pang PSI sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Melly Pangestu melalui media sosial Facebook Melly Pang PSI merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik, seperti halnya Melly Pangestu yang menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD sebagai Anggota DPRD di kota Semarang melalui postingan-postingan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dari dengan jumlah 1423 pengikut sejak 1 September hingga 28 Februari 2021 dari 396 postingan di Facebook Melly Pang PSI terdapat 8 postingan membahas mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 4 postingan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, 2 postingan mengenai fungsi anggaran dan 2 postingan mengenai fungsi legislasi, komunikasi yang ada pada akun Facebook Melly Pangestu


termasuk kedalam komunikasi dua arah, karena pada postingan-postingan terdapat respon tanggapan secara langsung dari Melly Pangestu di dalam kolom komentar tersebut.

Pengelolaan media sosial secara pribadi adalah cara Melly Pangestu untuk langsung terjun mengetahui kebutuhan masyarakat, Melly Pangestu sangat cepat tanggap dalam merespon komentar-komentar masyarakat, terlebih jika ada keluhan

dan aduan dari masyarakat, Melly Pangestu cepat dalam menanggapi dan melakukan peninjauan serta kunjungan lapangan, Melly Pangestu selalu melakukan peninjauan lapangan secara tuntas, hal ini membuktikan bahwa Melly Pangestu melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat dalam hal merespon dan

menanggapi apa kebutuhan masyarakat dan mengatasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.



Tabel 4.15 analisa data akun Facebook Muhammad Sifin Almufti (1 September 2019 – 28 Februari 2021)

Media Sosial : Muhammad Sifin Almufti

Pengikut : 5000
Jumlah Postingan : 7


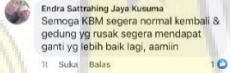
Sumber : Analisa data akun Facebook Muhammad Sifin Almufti sejak 1 September hingga 28 Februari 2021.

Yang ketiga, Muhammad Sifin Almufti sudah menggunakan akun Facebook sejak tahun 2013, berikut adalah komunikasi politik Muhammad Sifin Almufti melalui akun Facebook:

**Tabel 4.16 Olah data postingan akun Facebook Muhammad Sifin Almufti
(1 September 2019 – 28 Februari 2021)**



No	Tanggal	Materi	Komentar	Klasifikasi Materi
1	5 November 2019	<p>Foto :</p>  <p>Captions : Mewakili Fraksi PKS Kota Semarang, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dengan Acara :</p> <p>Pembicaraan Tk. I membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang APBD Kota Semarang TA. 2020 2. Raperda tentang RTBL Kawasan Kota Lama Semarang 3. Raperda tentang Perumda BPR Bank Pasar. <p>Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Semarang yang telah menutup resor Argorejo (Sunan Kuning).</p> <p>Smoga dengan dukungan dari segenap warga, Kota Semarang, bisa mewujudkan visinya yaitu :</p> <p>“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.</p> <p>#FraksiPksDprdSemarang</p>		Fungsi Legislasi
2	6 November 2019	<p>Captions : Hari ini mulai membahas RAPBD Kota Semarang Tahun 2020 bersama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdalduk dan KB 2. DP3 dan A 3. Dinas Sosial 4. Disbudpar 		Fungsi Anggaran



		<p>5. KONI</p> <p>Bersambung hari2 berikutnya dg OPD yg lain. “Dulur-dulur Semarang.... ada titipan?”</p>		
3	24 November 2019	<p>Foto :</p>  <p>Captions :</p> <p>“Menyambut Hari Guru 25 November 2019 masih dengan keprihatinan. Empati pada guru honorer dan guru swasta yang masih dibawah umk, tertundanya gaji guru honorer, yg bisa jadi berimbas pada peningkatan kualitas guru.</p> <p>Khusus di Semarang, kasus SMP 16 yang sebagian fasilitasnya diterjang tol Semarang-Batang sudah 3 tahun terkatung-katung. Belum ada hasil signifikan dari proses yg sudah dilakukan.</p> <p>Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong Disdik untuk segera</p>		Fungsi Pengawasan

		<p>mengkomunikasikan dengan Kemendikbud agar SMP 16 segera direlokasi di tempat yg lebih layak.</p> <p>Pembangunan memang butuh pengorbanan, tapi efek negatif yg berlarut-larut pasti akan menjadikan guru dan siswa menjadi korban yg merasakan dampak secara langsung dari proses itu”.</p> <p>#HargaiJasaGuru #PendidikanAdalahNafasBangsa</p> <p>https://fpkskotasemarang.id/2019/11/23/terkena-proyek-tol-komisi-d-dprd-kota-semarang-dorong-smp-16-segera-direlokasi/</p>		
4	7 Januari 2020	<p>Foto :</p> 		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions :</p> <p>“Seharian ini Komisi D turba ke Sd Palebon 1 yg sebagian kelasnya roboh, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk ngecek kesiapan mereka mengantisipasi dan menanggulangi bencana, Dinas Pemadam Kebakaran Posko Plamongan Indah, karaoke-karaoke liar sekitar terminal Penggaron, Mengunjungi salah satu pabrik bermasalah yg menunda gaji karyawannya dan terakhir menuju BLK Gayamsari.</p> <p>Segala aktifitas ini menjadi bagian dari salah satu tugas kami, pengawasan.</p> <p>Smoga tetap terjalin kerjasama yg baik dg masyarakat dan dinas terkait”.</p> <p>#DprdKotaSemarang #PKSAyoLebihBaik #MembangunDenganHati</p>		
5	5 Maret 2020	<p>Foto :</p> 		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions : Berdasarkan PP no 13 / Tahun 2020 semua sekolah harus bisa menerima anak disabilitas.</p> <p>Pertanyaannya, “kapan pemerintah tuntas menyiapkan fasilitas fisik pendukung dan pelatihan sdm gurunya, sehingga semua sekolah benar-benar siap menerima anak disabilitas?...”</p> <p>#KonsulKemendikbud #DprdKotaSemarang</p>		
6	6 Januari 2020	<p>Foto :</p> 		Fungsi Legislasi

		 <p>Captions ; Dalam perspektif apapun kesetaraan gender butuh diperjuangkan. Dalam perspektif agama, suku, ras, sosial, budaya, kinerja, penghormatan kepada kaum perempuan bisa diberikan dengan memberikan peran yang layak padanya sehingga berimbang pada tegaknya keadilan.</p> <p>Mohon doa warga Semarang, saat ini Pansus PUG DPRD Kota Semarang sedang maraton menggodog Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), menjadi Perda pertama yang akan ditetapkan pada tahun 2021 ini.</p> <p>#BersamaMelayaniRakyat</p>		
7	12 November 2019	Foto : 		Fungsi Pengawasan

		 <p>Captions : Evaluasi Kampung Tematik</p> <p>Tahun 2020 semua Kelurahan, sejumlah 177 kel. di Semarang diprogramkan menjalankan Kampung Tematik. Sesuai harapannya, semoga Kampung Tematik bisa memicu perekonomian masyarakat lebih meningkat, budayanya terjaga dan lebih guyub</p> <p>Ada byk hal yg butuh dievaluasi, salah satunya, kemanfaatan Kampung Tematik hendaknya bisa dirasakan banyak warga, bukan segelintir orang yg kebetulan punya profesi tertentu sesuai dg tema kampungnya.</p> <p>Berikutnya, kekhasan itu diangkat dari potensi dan budaya masyarakat, bukan karena keinginan pemkot Semarang. Agar kekuatannya lebih mengakar dan terpenting....bisa istiqomah ☺.</p> <p>#SifinDprdSemarang #PKSBerkhidmat</p>		
--	--	--	---	--

Sumber : Olah data postingan akun Facebook Muhammad Sifin Almufti sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh Muhammad Sifin Almufti

melalui media sosial Facebook Muhammad Sifin Almufti merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik, seperti halnya Muhammad Sifin Almufti yang menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD sebagai Anggota DPRD di kota Semarang melalui postingan-postingan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat. Berdasarkan observasi dari dengan jumlah 5000 pengikut sejak 1 September hingga 28 Februari 2021 dari 317 postingan di Facebook Muhammad Sifin Almufti terdapat 7 postingan membahas mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 4 postingan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, 1 postingan mengenai fungsi anggaran dan 2 postingan mengenai fungsi legislasi, komunikasi yang ada pada akun Facebook Muhammad Sifin Almufti termasuk kedalam komunikasi dua arah, karena pada postingan-postingan terdapat respon tanggapan secara langsung dari Muhammad Sifin Almufti di dalam kolom komentar tersebut.

Pada tabel 3.14 berupa foto, komentar dan *captions* pada akun Facebook Muhammad Sifin Almufti terdapat total 21 postingan foto dan 27 komentar, Pengelolaan media sosial secara pribadi adalah cara Muhammad Sifin Almufti membuktikan bahwa dengan aktivitas sebagai Anggota DPRD di Kota Semarang, Muhammad Sifin tidak hanya berkomunikasi baik secara offline tetapi berkomunikasi politik secara baik melalui online media jejaring sosial karena Muhammad Sifin melakukan komunikasi dua arah selalu merespon dan menanggapi komentar-komentar dari masyarakat. Muhammad Sifin juga lebih

banyak terjun ke lapangan karena Muhammad Sifin lebih banyak melakukan fungsi pengawasan pada postingannya sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 pada akun Facebook Muhammad Sifin Almufti, bagi Muhammad Sifin Almufti masyarakat adalah satu kelompok yang menerima hasil pembangunan yang nantinya kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, Facebook yang dikelola Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti dikelola untuk 3 hal antara lain : antara lain: (1) mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran); (2) berkomunikasi dengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masukan; (3) sarana hiburan yang diwujudkan dengan menggunakan media sosial sebagai penyaluran ekspresi diri dan informasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga. Namun Juan Rama, Melly Pangestu, dan Muhammad Sifin Almufti lebih banyak mengkomunikasikan ke media sosial perihal ekspresi diri dan kegiatan pribadi dibandingkan mengkomunikasikan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Data yang diperoleh, dari 398 postingan yang ada di akun Facebook dengan username : Juan Rama, Juan Rama hanya memposting 11 postingan berkaitan dengan fungsi dewan yaitu 6 postingan fungsi pengawasan, 3 postingan fungsi anggaran, 2 postingan fungsi legislasi. Pada akun Instagram dengan username : Melly Pang PSI, dari 396 postingan Melly Pangestu hanya memposting 4 postingan yang berkaitan dengan fungsi dewan yaitu fungsi pengawasan, 2 postingan berkaitan dengan fungsi legislasi, dan 2 postingan berkaitan dengan fungsi anggaran. Pada akun Facebook dengan username : Muhammad Sifin Almufti dari

317 postingan hanya 7 postingan yang berkaitan dengan fungsi dewan yaitu 4 postingan berkaitan dengan fungsi pengawasan, 2 postingan berkaitan dengan fungsi legislasi dan 1 postingan berkaitan dengan fungsi anggaran sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021. DPRD Kota Semarang perlu menyadari bahwa media sosial pada era multimedia mempunyai pengaruh dan manfaat dalam bidang kinerja, terlebih mereka adalah aktor politik yang kinerjanya dari masyarakat untuk masyarakat dan nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Perlu meningkatkan upaya dalam pengelolaan media sosial agar membuahkan hasil dengan munculnya respon seperti komentar. Sejauh ini, Facebook tersebut belum mendapatkan respon berupa komentar-komentar.

4.7. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial yang berguna untuk saling menghubungkan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Twitter didirikan dan diresmikan pada tahun 2006 tepatnya pada bulan Maret. Twitter dirikan oleh Jack Dorsey. Jejaring sosial twitter sudah sangat dikenal oleh setiap orang didunia. Bahkan di tahun 2014 layanan jejaring sosial twitter menjadi layanan jejaring yang menduduki urutan ke 5 besar situs yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang⁷⁴.

Twitter berkembang di Indonesia sebagai wahana komentar politik tanpa hambatan, bahkan untuk pemecahan berita politik. Pengguna Twitter bisa menjadi kurasi berita. Apa yang menggantikan gatekeeping, kemudian dapat dengan

⁷⁴ Basri, 2017, "Peran Media Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru"-*Jom FISIP*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, (Riau: Universitas Riau Bina Wadya) hal 9-10.

bermanfaat digambarkan sebagai gatewatching. Profesional dan warga sebagai jurnalis dan komentator melihat pintu gerbang organisasi yang bernilai berita yang informasinya relevan dengan minat khusus mereka. Mereka menangkap dan mengkompilasi informasi tersebut saat dirilis dan mereka memproses dan mengkurasi informasi semacam itu dengan tujuan untuk mempublikasikan berita dan komentar yang membangunnya⁷⁵.

Dari ke tiga Anggota DPRD Kota Semarang Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti dengan 140 karakter pada twitter sangat sulit untuk mengkomunikasikan aktivitas politiknya dengan detail, seperti Melly Pangestu sudah menggunakan Twitter sejak tahun 2010 pada akun @mellypangestu namun Melly Pangestu sudah tidak menggunakan twitter tersebut. Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti lebih tertarik menggunakan media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapps. Permasalahan seperti ini ternyata sama halnya dirasakan DPRD di kota Bandung dalam mengkomunikasikan kinerjanya melalui akun Twitter menjadi materi yang sulit untuk dikelola dibanding posting gambar dan video. Hal ini dimaklumi karena membuat deskripsi teks atau tulisan yang menarik dan membuat tagar yang bisa menjadi trending topic memang sangat sulit. Masyarakat Kota Bandung sendiri tidak semuanya mengakses informasi mengenai DPRD Kota Bandung melalui akun media sosial twitter⁷⁶.

Komunikasi politik melalui akun twitter juga sangat sulit untuk dilakukan Anggota DPRD Pekanbaru periode 2014-2019, menurut DPRD Pekanbaru

⁷⁵ Emeraldien, Sunarsono, dkk, 2019, "Twitter sebagai Platform Komunikasi Politik di Indonesia"-*SCAN*, Vol. XIV No. 1, Februari 2019, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional) hal 23

⁷⁶ Supriyadi, 2017, "Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung", *MediaTor*, Vol 10 (1), Juni 2017. (Bandung: Universitas Islam Bandung), hal 36

masyarakat lebih tertarik menggunakan media lain daripada menggunakan akun twitter, Anggota DPRD Pekanbaru sendiri juga sudah tidak aktif menggunakan akun Twitter dengan alasan yang sama yaitu sedikitnya jumlah karakter dalam penulisan, masyarakat lebih banyak menggunakan akun Instagram, Facebook dan Website daripada akun Twitter⁷⁷.

4.8. Fungsi DPRD

Menurut Asmawi, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD Riau dalam kerangka mengemban amanat rakyat di propinsi dan kabupaten/kota⁷⁸.

Fungsi Legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang. Fungsi Legislasi adalah fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur, ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi⁷⁹. Fungsi anggaran, DPRD diberikan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan

⁷⁷ Andika, Nasution, dkk, 2021, "Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Menjalankan Fungsi Legislasi tahun 2014-2019"-JURNAL RANAH KOMUNIKASI. Vol. 5 No. 1, 2021. (Riau: Universitas Riau), hal 17

⁷⁸ Asmawi, 2014, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah"-*Jurnal Citra Hukum*, Vol. I. No. 1, Juni 2014, (Jakarta: Universitas Islam Negeri) hal 8

⁷⁹ Grahanda, Indarja, dkk, 2017, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014"-*Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6. No. 1, Tahun 2017. Hal 5

oleh Kepala Daerah⁸⁰. Fungsi pengawasan DPRD, dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat pula. Dalam menjalankan pemerintahan dan terjadi sikap saling mengawasi serta tidak ada lembaga daerah yang melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan⁸¹.

Juan Rama, Muhammad Sifin Almufti dan Melly Pangestu yang menjabat sebagai Anggota DPRD di kota Semarang periode 2019 – 2024 melaksanakan kinerjanya sebagai Anggota DPRD kota Semarang yang berkaitan dengan 3 fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan ke 3 Anggota DPRD kota Semarang tersebut untuk melihat bagaimana mereka melakukan komunikasi politik melalui media sosial.

Postingan Juan Rama lebih banyak mengkomunikasikan fungsi Pengawasan melalui akun media sosial Instagram @ramajuan, dari 11 postingan, Juan Rama mengkomunikasikan 6 fungsi Pengawasan, 3 fungsi Anggaran, dan 2 fungsi Legislasi. Melalui akun media sosial Facebook pada akun Juan Rama. Juan Rama lebih banyak mengkomunikasikan fungsi Pengawasan, dari 11 postingan, Juan Rama mengkomunikasikan 6 fungsi Pengawasan, 3 fungsi Anggaran, dan 2 fungsi Legislasi. Melalui akun Twitter, Juan Rama tidak aktif menggunakan Twitter dari

⁸⁰ *Ibid*, hal 9-10

⁸¹ Santoso, 2011, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”- *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 4, 18 Oktober 2011: 604-620, (Samarinda: Universitas WIdya Gama Mahakam) hal 614.

1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Terkait 3 fungsi DPRD, Muhammad Sifin Almufti Muhammad Sifin Almufti lebih banyak mengkomunikasikan fungsi Pengawasan melalui akun media sosial Facebook, dari 7 postingan, Muhammad Sifin Almufti mengkomunikasikan 4 fungsi Pengawasan, 1 fungsi Anggaran, dan 2 fungsi Legislasi. Muhammad Sifin Almufti tidak mengkomunikasikan kinerjanya melalui akun Instagram @muhammadsifin.

Terkait 3 fungsi DPRD, Melly Pangestu mengkomunikasikan kinerjanya melalui akun media sosial Instagram @mellypangpsi, dari 2 postingan di akun Instagram, Melly Pangestu mengkomunikasikan 2 fungsi Pengawasan. Pada akun media sosial Facebook Melly Pang PSI, Melly Pangestu lebih banyak mengkomunikasikan fungsi pengawasan, dari 8 postingan, Melly Pangestu mengkomunikasikan 4 fungsi Pengawasan, 2 fungsi Anggaran, dan 2 fungsi Legislasi. Melly Pangestu tidak aktif menggunakan Twitter dari 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

Fungsi legislasi yang dikomunikasikan Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti sejak 1 September 2021 hingga 28 Februari 2021 yaitu rapat pansus raperda produk makanan halal dan higienis, raperda tentang RTBL Kawasan Kota Lama Semarang, raperda tentang Perumda BPR Bank Pasar dan raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada fungsi legislasi, para Anggota DPRD tersebut membahas mengenai raperda, mereka mengkomunikasikan melalui media sosial dalam hal kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengsahkan Undang-Undang.

Fungsi Anggaran yang yang dikomunikasikan Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti sejak 1 September 2021 hingga 28 Februari 2021 yaitu rapat Badan Anggaran TA 2020 dan Pembahasan RAPBD TA 2020. Para Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 pada aktivitas politiknya melalui media sosial membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Fungsi pengawasan yang dikomunikasikan Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti sejak 1 September 2021 hingga 28 Februari 2021 yaitu sidak PDAM Kaligarong, kunjungan lapangan SMPN 16 Semarang, rapat dengar pendapat mengenai produk makanan halal, mengenai pembangkit listrik tenaga sampah oleh PT Bhumi Sejahtera, mengenai pengurusan lahan PKL di Semarang, evaluasi kampung tematik, peninjauan tanggul dan pompa di Punggung Lor, Kunjungan Lapangan SD Palebon 1 yang roboh, himbauan dinas ketenagakerjaan. Mereka sebagai anggota DPRD sekaligus sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat pula. Dalam menjalankan pemerintahan dan terjadi sikap saling mengawasi serta tidak ada lembaga daerah yang melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang paling banyak dikomunikasikan oleh Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti. Anggota DPRD melakukan kinerja untuk kebutuhan masyarakat, jadi apa yang bisa diinformasikan pasti selalu diinformasikan dan fungsi pengawasan lebih banyak dikomunikasikan karena semua kembali lagi untuk masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh

Muhammad Sifin Almufti “Disini masyarakat adalah satu kelompok yang menerima hasil pembangunan, dan basisnya anggaran dan basisnya legislasi yang nantinya kembali ke masyarakat, dan masyarakat jauh lebih unggul dan lebih banyak dalam menerima kebutuhan,karena semua apa yang dilakukan juga nantinya untuk masyarakat” (Lampiran 2, hal e)

DPRD memiliki 3 fungsi, semua fungsi saling terkait dan sebelum dan setelah kebijakan-kebijakaan pemerintah disetujui untuk dilaksanakan tentunya fungsi pengawasan akan menjadi yang paling terpenting apakah semua sudah dijalankan atau harus diperbaiki demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan masyarakat adalah satu kelompok yang menerima hasil pembangunan, dan basisnya anggaran dan basisnya legislasi yang nantinya kembali ke masyarakat, dan masyarakat jauh lebih unggul dan lebih banyak dalam menerima kebutuhan,karena semua apa yang dilakukan juga nantinya untuk masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Melly Pangestu “DPRD memiliki 3 fungsi..semua fungsi saling terkait. Dan mengapa lebih ke pengawasan? Karena sebelum dan setelah kebijakan2 pemerintah disetujui untuk dilaksanakan tentunya fungsi pengawasan akan menjadi yg paling terpenting apakah semua sudah dijalankan atau harus diperbaiki demi tercapainya kesejahteraan masyarakat” (Lampiran 3, hal g)

Namun dari hasil observasi Peneliti dari 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021, Ramajuan, Muhammad Sifin Almufti dan Melly Pangestu lebih banyak mengkomunikasikan aktivitas yang tidak berkaitan dengan fungsi DPRD, jumlah postingan sangat jauh karena sejak 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 hanya terdapat 7 postingan dari 317 postingan yang beliau unggah di

Facebook Muhammad Sifin Almufti. 0 postingan dari 80 postingan pada akun Instagram @muhammadsifin. Juan Rama hanya terdapat 11 postingan dari 206 postingan yang beliau unggah di Instagram @ramajuan, dan 11 postingan dari 398 postingan yang beliau unggah di Facebook Juan Rama. Pada media sosial Instagram Melly Pangestu @mellypangpsi hanya terdapat 2 postingan dari 76 postingan yang beliau unggah dan hanya terdapat 8 postingan dari 396 postingan yang beliau unggah di Facebook Melly Pang PSI. Pada akun media sosial Twitter, mereka tidak menggunakan sama sekali untuk mengkomunikasikan kinerjanya yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

